

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
ADAT SADE SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN
EKONOMI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

AHMADI
NIM 2022B1B005

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA ADAT SADE SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Oleh:

AHMADI

Untuk memenuhi Ujian Akhir
Pada tanggal 15 Juni 2026

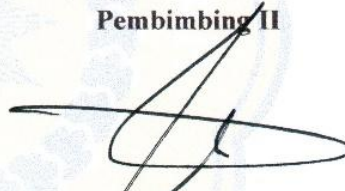
Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I



Drs. H. Mintasrihardi, M.H
NIDN. 0830016101

Pembimbing II



Iskandar, S.Sos., M.A
NIDN. 0802048904

Mengetahui,.



Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA ADAT SADE SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Oleh :

AHMADI

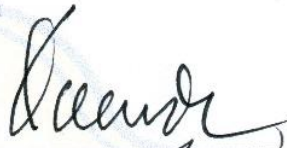
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 15 Juni 2026
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

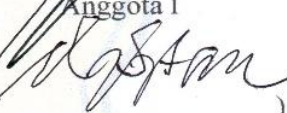
Drs. H. Mintasrihardi, M.H
NIDN. 0830016101

Iskandar, S.Sos., MA
NIDN. 0802048904

Drs. H. Mustamin H Idris, M.S
NIDN. 0031126484


(
Ketua


(
Anggota I


(
Anggota II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S. IP., M. PA
NIDN. 0806058402

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 15 Juni 2026



Ahmadi
2022B1B005



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi
NIM : 2022010005
Tempat/Tgl Lahir : Baget Kedok 19 Juli 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087334968607
Email : madymadeti9@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam
Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Sebagai Strategi Peningkatan
Ekonomi Masyarakat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 5 Agustus 2026

Penulis



Ahmadi
NIM. 2022010005

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi
NIM : 2022010005
Tempat/Tgl Lahir : Baget, Kedok, 19 Juli 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIROL
No. Hp/Email : 087734968607 / madymadet19@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul: "

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam
Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Sebagai Strategi
Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 5 Agustus.....2026
Penulis



Ahmadi
NIM. 2022010005

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 080204890

MOTTO

“Terkadang aku meragukan diriku sendiri, tetapi aku selalu percaya pada setiap usaha yang aku lakukan. Aku tidak selalu kuat, namun aku selalu memilih untuk bertahan hingga selesai”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini kupersembahkan dengan sepuh hati kepada orang-orang yang paling berarti dalam hidupku:

1. Untuk Ibuku tercinta, Hj. Rohmah, sosok paling kuat dan penuh kasih dalam hidupku. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, air mata yang diam-diam kau jatuhkan untukku, dan cinta yang tak pernah berkurang sedikit pun. Dalam setiap lelah dan ragu, namamulah yang selalu menjadi alasan aku untuk tetap bertahan. Semoga karya kecil ini menjadi sedikit kebahagiaan untukmu.
2. Untuk Ayahku tersayang, H. Rohiman, terima kasih atas segala pengorbanan yang mungkin tak pernah bisa aku balas. Kerja kerasmu, diamnya perjuanganmu, dan doa yang selalu kau panjatkan menjadi kekuatan terbesar dalam hidupku. Aku ada di titik ini karena engkau tidak pernah menyerah untukku.
3. Untuk kakak laki-lakiku, Kak Saepul dan Istrinya Kak Mae, terima kasih telah menjadi tempat pulang yang hangat, tempat berbagi, dan sumber semangat di setiap langkahku. Dukungan kalian adalah alasan aku tetap kuat.
4. Untuk kakak perempuanku Kak Uyun dan Suaminya Kak Juna, terima kasih atas perhatian, doa, dan kasih sayang yang selalu menguatkanmu, bahkan saat aku merasa lemah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Abdul Wahab, MA. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S, IP., M. PA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad , S. AP., M. AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. H. Minstasrihardi, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Iskandar, S. Sos., MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, saran, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Hj. Rohmah dan Bapak H. Rohiman, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dan perjuangan yang tidak pernah berhenti demi masa depan penulis. Semua yang penulis capai hari ini tidak akan berarti tanpa cinta dan dukungan kalian.

7. Kepada laki-laki saya, Kak Saepul dan istrinya Kak Mae, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa selama saya menyelesaikan skripsi ini.
8. kepada kakak perempuan saya, Kak Uyun dan suaminya Kak Juna, yang selalu memberikan perhatian, motivasi, dan doa sehingga saya bisa sampai di tahap ini.
9. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat saya sejak kecil hingga saat ini, Bustomi dan Payail, yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir dalam suka maupun duka. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan sukses selalu menyertai kita semua.
10. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, teman-teman, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan menemani penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Mataram, 15 Juni 2026

Ahmadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmad-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat**. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S. AP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan tepatan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Mataram, 15 Juni 2026

Ahmadi

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Ahmadi.¹ Drs. H. Mintasrihardi, MH.² Iskandar, S. Sos., MA.³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade dan sebagai strategi peningkatan ekonomi masyarakat dan dampaknya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, dinamisator, koordinator, inovator, dan regulator dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Strategi yang dilakukan meliputi promosi wisata, peningkatan fasilitas wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Strategi tersebut memberikan dampak positif seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penjualan produk lokal, peningkatan lapangan kerja, dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya. Namun, pengembangan Desa Wisata Adat Sade masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi, keterbatasan fasilitas pendukung, belum meratanya pendapatan masyarakat, serta kunjungan wisatawan yang masih bergantung pada penyelenggaraan event. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Desa Wisata, Ekonomi Masyarakat.

***The Role of the Central Lombok Regency Government in the Development of
the Sade Traditional Tourism Village as a Strategy
for Community Economic Development***

Ahmadi.¹ Drs. H. Mintasrihardi, MH.² Iskandar, S. Sos., MA.³

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Central Lombok Regency local government in the development of the Sade Traditional Tourism Village, examine its strategies for improving the community's economy and their impacts, and identify the obstacles encountered. This study employs a qualitative approach using a descriptive research design. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results show that the local government of Central Lombok Regency has fulfilled its role as a facilitator, catalyst, coordinator, innovator, and regulator in the development of the Sade Traditional Tourism Village. The strategies implemented include tourism promotion, improvement of tourism facilities, community empowerment, and preservation of local culture. These strategies have had positive impacts, such as increased community income, increased sales of local products, increased employment opportunities, and heightened community awareness regarding cultural preservation. However, the development of the Sade Traditional Tourism Village still faces several challenges, namely the community's limited understanding of digitalization, insufficient supporting facilities, unequal distribution of community income, and tourist visits that remain dependent on the organization of events. The local government's role in the development of the Sade Traditional Tourism Village is already underway. Still, it needs to be enhanced to maximize its impact on improving the community's economy.

Keywords: Local Government, Tourism Village, Community Economy.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teori	11
2.2.1. <i>Grand Theory</i>	11
2.2.2. Teori Kebijakan	13
2.2.3. Peran Pemerintah Daerah	15
2.2.4. Pengembangan Desa Wisata.....	20
2.2.5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat	26
2.3 Batasan Masalah.....	28
2.4 Kerangka Berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Waktu Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Penentuan Informan.....	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Hasil Penelitian	42
4.2.1 Peran Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat	42
4.2.2 Strategi Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat	60
4.2.3 Kendala Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat	73
4.3 Pembahasan.....	76
4.3.1 Peran Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade	76
4.3.2 Strategi Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat	80
4.3.3 Kendala Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

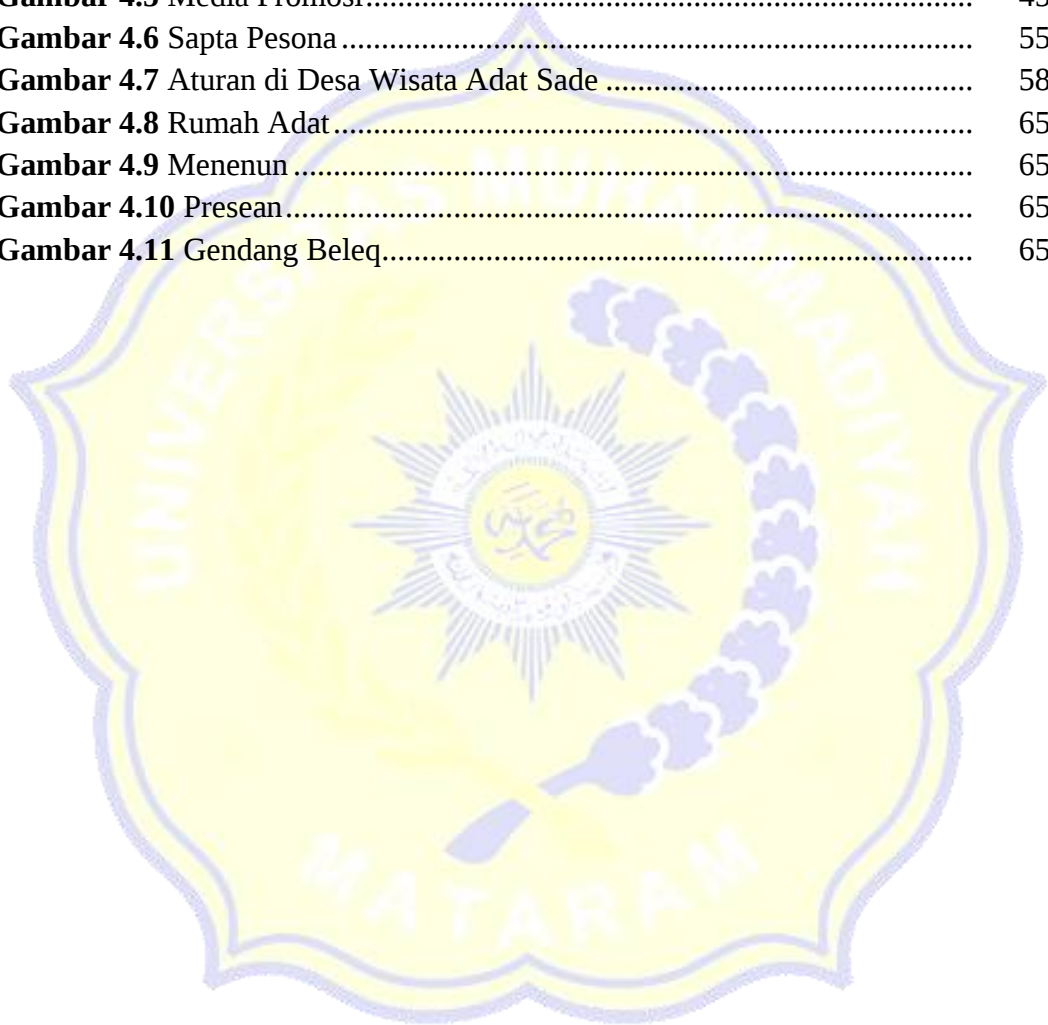
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Dari Tahun 2022-2025	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Data Informan	36
Tabel 4.1 Fasilitas Di Desa Wisata Adat Sade	43
Tabel 4.2 Data Promosi	44
Tabel 4.3 Data Pelatihan Pengelola Wisata Adat Sade	48
Tabel 4.4 Data Koordinasi Desa Wisata Adat Sade	51
Tabel 4.5 Data Inovasi Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade	54
Tabel 4.6 Data Regulasi Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade	57
Tabel 4.7 Data Strategi Promosi.....	60
Tabel 4.8 Data peningkatan Fasilitas Wisata	62
Tabel 4.9 Data pemberdayaan masyarakat.....	63
Tabel 4.10 Data pelestarian budaya lokal.....	66
Tabel 4.11 Data Rata-rata Pendapatan Masyarakat Tahun 2022–2026	68
Tabel 4.12 Data Penjualan Produk Lokal Tahun 2022–2026	70
Tabel 4.13 Data Kesempatan Kerja Tahun 2022–2026	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	30
Gambar 4.1 Lembaga Pengelola Desa Wisata Sade	39
Gambar 4.2 Organisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Sade	39
Gambar 4.3 Gerbang Desa Sade	40
Gambar 4.4 Gapura Desa Sade	40
Gambar 4.5 Media Promosi	45
Gambar 4.6 Sapta Pesona	55
Gambar 4.7 Aturan di Desa Wisata Adat Sade	58
Gambar 4.8 Rumah Adat	65
Gambar 4.9 Menenun	65
Gambar 4.10 Presean	65
Gambar 4.11 Gendang Beleq	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan wilayah kepulauan, memiliki sektor pariwisata yang berpotensi pertumbuhan yang tinggi. Kekayaan alam dan keberagaman budaya menjadikan Indonesia memiliki daya tarik wisata yang besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga kearifan lokal masyarakatnya. Melalui sektor pariwisata, suatu daerah dapat memperoleh berbagai manfaat dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sektor ini berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas dan potensi daerah. Pengembangan pariwisata akan berjalan lebih optimal apabila didukung oleh fasilitas yang memadai serta adanya upaya revitalisasi secara berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur.(Alfianto & Fauzi, 2021)

Pariwisata merupakan salah satu industri global yang terus dikembangkan karena memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara global, pariwisata telah menjadi salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dunia sekaligus penyumbang devisa terbesar bagi banyak negara (Deki, 2019).

Di Indonesia, pengembangan pariwisata telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan negara yang cukup tinggi menjadikannya sebagai salah satu industri unggulan yang terus dikembangkan dan diprioritaskan dalam upaya memperkuat perekonomian Indonesia (Budiatiningsih et al., 2025)

Melalui pengembangan sektor pariwisata, berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran dapat dikurangi. Pembangunan dan pengembangan pariwisata memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia secara luas, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan Daerah Tujuan Wisata. Selain itu, sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah (Juhainah & Firmansyah, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, khususnya Pasal 29, menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal. Pelaksanaan pengembangan tersebut melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama, dengan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata adalah Kabupaten Lombok Tengah, yang saat ini tengah mengembangkan konsep ekowisata berbasis kearifan lokal. Salah satu contoh nyata pengembangan tersebut dapat dilihat pada Kampung Wisata Dusun Sade, yang menjadi ikon wisata budaya Suku Sasak. Dusun Sade dikenal karena kemampuannya mempertahankan keaslian budaya, tradisi lokal, serta kehidupan pedesaan yang masih alami dengan arsitektur rumah adat yang khas. Daya tarik budaya dan kearifan lokal ini menjadikan Dusun Sade memiliki nilai pasar yang tinggi serta potensi besar untuk dikembangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan. Keberhasilan Dusun Sade sebagai destinasi ekowisata budaya bahkan dapat dijadikan model pengembangan bagi daerah lain di Lombok Tengah untuk menonjolkan identitas dan karakteristik daerahnya masing-masing dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Pulau Lombok (Murapi et al., 2023).

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya melalui desa wisata berbasis budaya lokal. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lombok Tengah, di mana pengembangan pariwisata diarahkan untuk memperkuat identitas budaya Suku Sasak melalui desa wisata adat. Salah satu contohnya adalah Desa Sade, yang menjadi ikon pelestarian budaya Sasak sekaligus destinasi wisata unggulan di Lombok Tengah. Pemerintah daerah secara aktif memberdayakan dan mendorong masyarakat Desa Sade untuk

menjaga serta melestarikan warisan tradisi leluhur melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Keberhasilan program desa wisata sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan destinasi wisata (Pratiwi et al., 2019).

Dusun Sade merupakan salah satu kawasan adat di Pulau Lombok yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Keberadaan dusun ini tidak hanya menjadi representasi identitas masyarakat Suku Sasak, tetapi juga menjadi warisan budaya yang masih mempertahankan tradisi secara turun-temurun selama lebih dari 1.500 tahun. Dusun Sade berada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berlokasi di sepanjang jalur utama Praya-Kuta dengan jarak sekitar 30 kilometer dari Kota Mataram, sehingga memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan. Dengan perkiraan waktu perjalanan sekitar satu jam menggunakan kendaraan, kawasan ini telah menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sejak tahun 1975, Dusun Sade sudah mulai dikenal sebagai tujuan wisata budaya, peningkatan kunjungan wisatawan secara signifikan baru terjadi setelah peresmian Bandara Internasional Lombok Praya pada November 2011. Akses yang mudah dari bandara ke Dusun Sade, hanya sekitar 10–15 menit perjalanan, menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan sekaligus memperkuat posisi Dusun Sade sebagai ikon wisata budaya Suku Sasak di Lombok Tengah (Murapi et al., 2023).

Tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Adat Sade selama tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022 hingga 2025. Data ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan dan tren kunjungan wisatawan sebagai salah satu indikator pertumbuhan sektor pariwisata di Desa Wisata Adat Sade.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2022	121.596
2	2023	135. 816
3	2024	147. 937
4	2025	162. 781

Sumber: Pengelola Desa Wisata Adat Sade

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata Adat Sade mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan minat wisatawan terhadap daya tarik adat dan budaya yang dimiliki Desa Wisara Sade. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Desa Wisata Adat Sade berpotensi menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi masyarakat.

Kondisi Desa Wisata Adat Sade saat ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam menyediakan fasilitas wisata yang memadai. Meski demikian, jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini

terutama didorong oleh keaslian budaya Sasak yang tetap terjaga sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Selain faktor budaya, lokasi Desa Sade yang sangat strategis berada di jalur Praya-Kuta Mandalika. Posisi tersebut menjadikan desa ini mudah diakses oleh wisatawan sehingga banyak wisatawan yang singgah meskipun fasilitas belum sepenuhnya memadai. Apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan perannya secara lebih optimal baik melalui penyediaan fasilitas yang layak, penataan kawasan yang lebih baik, maupun promosi yang lebih intensif maka potensi pariwisata Desa Sade akan berkembang lebih pesat. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan jumlah kunjungan secara signifikan di masa depan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan Desa wisata Sade, serta bagaimana bagaimana strategi dan dampaknya dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Selain itu, Desa Wisata Adat Sade dipilih karena keunikannya sebagai desa adat suku Sasak yang masih mempertahankan tradisi dan budaya lokal, sehingga sangat menarik untuk dikaji dari sisi bagaimana pemerintah daerah mampu mengembangkan potensi budaya tersebut menjadi strategi peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Adat Sade?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Wisata Adat Sade?
3. Apa kendala dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yang hendak ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Adat Sade.
2. Untuk mengetahui sejauhmana strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Wisata Adat Sade.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintah dan instansi terkait penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata.
- b. Bagi masyarakat desa Rembitan Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah terkait pengembangan desa wisata.

2) Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain serta digunakan sebagai perbandingan dalam kajian lebih mendalam mengenai pengembangan desa wisata dan kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi teman-teman yang ingin meneliti peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya-karya yang membahas topik serupa dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti. Penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dan panduan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Hasanah et al., (2025)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa	Kualitatif Deskriptif (Wawancara, Observasi dan dokumentasi)	Pemerintah desa telah menerapkan berbagai strategi seperti pelatihan, promosi melalui media digital, serta pengembangan infrastruktur	Persamaan terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu Desa Wisata Adat Sade. Perbedaannya menitikberatkan pada strategi pemerintah desa, sedangkan penelitian ini berfokus peran pemerintah daerah
2	Putri et al., (2025)	Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam Pengembangan Desa Wisata Aik Berik	Kualitatif (studi kasus, observasi, wawancara, dan dokumentasi)	Dinas Pariwisata Lombok Tengah memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata Di Desa Aik Berik.	Persamaan meneliti peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata. Perbedaannya Berfokus pada desa wisata lain (Aik Berik), bukan Desa Sade

3	Sulaeman (2024)	Kajian Potensi Unggulan Desa Wisata Sade sebagai Objek Desa Wisata Budaya Berbasis Masyarakat	Kualitatif Deskriptif (observasi, wawancara, dan dokumentasi)	Desa Sade memiliki potensi budaya (rumah adat, tenun ikat, presean) yang kuat, pengembangan berbasis masyarakat efektif apabila didukung kebijakan dan fasilitasi pemerintah.	Persamaannya yaitu peran dan dukungan pemerintah sangat penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaannya yaitu Penekanan kuat pada potensi budaya dan model pengembangan berbasis masyarakat
4	Anastasya (2024)	Pemberdayaan masyarakat oleh dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata Sade (studi Desa Rembitan)	Kualitatif (observasi, wawancara, dan dokumentasi)	Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Desa Wisata Sade telah dilakukan dengan cukup baik.	Persamaan Langsung relevan yaitu menilai peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Desa Wisata. Perbedaannya terletak pada Fokus program pemberdayaan oleh pemerintah daerah (Dinas Pariwisata)
5	Wina Virania (2023)	Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Dan Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	Kualitatif Deskriptif (observasi, wawancara, dan dokumentasi)	Pengembangan Desa Wisata Adat Sade berdampak positif bagi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan , membuka lapangan kerja, serta menjaga kelestarian adat dan budaya.	Persamaan membahas dampak pengembangan Desa Wisata Adat Sade terhadap ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada focus dari masing-masing penelitian.

2.2. Kajian Teori

2.2.1 *Grand Theory*

Berdasarkan teori Administrasi Publik modern, pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan, mengatur, dan mengelola berbagai urusan pemerintahan pada tingkat daerah atau lokal. (Mansyur & Zubakhrum, 2024: 15). Berikut rincian perannya:

1) Peran sebagai Pelayanan Publik (Fasilitator)

Pemerintah daerah berperan dengan menyediakan berbagai sumber daya dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

a. Penyediaan Insfrastruktur

Membangun dan memelihara infrastruktur fisik penting seperti jalan akses, pasokan air dan listrik, serta fasilitas pendukung pariwisata lainnya.

b. Melakukan Promosi

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan, menyebarluaskan, dan meningkatkan daya tarik suatu daerah atau potensi yang dimiliki, termasuk sektor pariwisata kepada masyarakat luas.

2) Peran sebagai Pemberdayaan (Dinamisator)

Pemerintah daerah berperan dalam memberdayakan dan menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata.

a. Mendorong partisipasi masyarakat

Menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat lokal, yang merupakan aktor utama pada setiap tahapan pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

b. Pengembangan Potensi Lokal

Pengembangan Potensi Lokal Mengembangkan potensi lokal, seperti kearifan lokal, budaya, dan sumber daya manusia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Peran sebagai Koordinasi (Koordinator)

Pemerintah daerah mengoordinasikan berbagai sektor terkait agar pengembangan desa wisata berjalan secara komprehensif dan terintegrasi.

a. Koordinasi Antar Instansi

Mengoordinasikan berbagai instansi dan lembaga di tingkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif..

b. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan daerah.

4) Peran sebagai Inovasi (Inovator)

Pemerintah daerah memperkenalkan ide dan program baru untuk memaksimalkan potensi desa wisata.

a. Pengembangan program pembangunan

Menyiapkan program pembangunan desa yang inovatif dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya dan geografis lokal.

b. Pengembangan produk wisata

Mendorong pengembangan atraksi wisata yang unik dan otentik, serta inovasi dalam pengelolaan dan pemasaran desa wisata (termasuk digitalisasi).

5) Peran sebagai Pengaturan (Regulator)

a. Penyusunan kebijakan

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan regulasi di tingkat daerah, seperti peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah (perkada), dan keputusan kepala daerah (kepada).

b. Penegakan Hukum:

Menegakkan hukum dan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di wilayahnya.

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah sangat penting Dalam Pengembangan Desa Wisata. Peran Peran ini bersifat umum dan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi masing-masing daerah.

2.2.2 Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan “rencana yang dirancang terkait dengan sasaran, nilai, dan praktik” (Said Zainal Abidin 2004:20). “Kebijakan merupakan resolusi yang stabil, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan

berulang pada pihak yang merumuskan kebijakan serta yang menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan” (Tangkilisan, 2003: 3).

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau langkah yang disusun oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dipengaruhi oleh berbagai peluang dan kendala yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Leo Agustino, 2008: 7). Pandangan tersebut menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya dipahami sebagai perilaku yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Dengan demikian, kebijakan tidak cukup hanya berupa usulan atau rencana, melainkan harus diimplementasikan secara konkret untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Menurut Wahab (2008: 40–50) Konsep kebijakan hingga saat ini masih menjadi topik yang memunculkan berbagai pandangan dan perdebatan di kalangan para ahli. Oleh sebab itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kebijakan, dikemukakan beberapa pedoman penting sebagai berikut:

1. Kebijakan perlu dibedakan secara jelas dari keputusan
2. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan;
3. Kebijakan pada hakikatnya tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas dari administrasi.
4. Kebijakan mencakup aspek perilaku serta harapan;

5. Kebijakan meliputi tindakan maupun ketidakhadiran tindakan
6. Kebijakan dapat berupa pilihan untuk tidak bertindak
7. Kebijakan lahir dari suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan;
8. Kebijakan mencakup hubungan yang bersifat antarorganisasi maupun intraorganisasi;
9. Kebijakan publik, meskipun tidak secara eksklusif, berkaitan erat dengan peran strategis lembaga-lembaga pemerintah; dan
10. Kebijakan dirumuskan atau dimaknai secara subjektif.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau aktivitas, baik yang dilakukan maupun yang sengaja tidak dilakukan, oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Kebijakan tersebut mencerminkan proses pengambilan keputusan dalam memilih berbagai alternatif tindakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.3 Peran Pemerintah Daerah

1) Peran

a. Pengertian peran

Peran merupakan aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang. Dalam konteks organisasi, peran mengacu pada tugas atau fungsi yang dijalankan oleh individu sesuai dengan posisi atau status yang dimilikinya. Secara terminologis, peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau posisi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. (Torang, 2014: 86).

Koentjaraningrat (2018: 23) menjelaskan bahwa peran merupakan individu yang berkaitan dengan suatu kedudukan tertentu, sehingga konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam suatu organisasi maupun sistem sosial. Selanjutnya, Soekanto (2012) memaknai Peran dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status yang tercermin melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, seseorang dianggap telah menjalankan perannya apabila mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang diemban. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Penulis menyimpulkan bahwa Peran merupakan bentuk persepsi maupun tindakan yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

b. Jenis peran

Menurut Bruce J. Cohen (1992: 76) dalam Salasiah & Albertus (2025), peran dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu peran nyata (*enacted role*), yang menunjukkan bagaimana individu atau kelompok benar-benar menjalankan perannya; peran yang dianjurkan (*prescribed role*), yaitu perilaku yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan peran yang dimilikinya; serta konflik peran (*role*

conflict), yaitu keadaan ketika seseorang mengalami pertentangan tuntutan atau harapan dalam menjalankan posisi maupun perannya.

Dari jenis-jenis peran di atas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*anacted role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

2) Pemerintah Daerah

Menurut Syafiie (2013: 11), pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur, menetapkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan di suatu wilayah. Di samping itu, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan roda pemerintahan, memberikan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, menurut Ndraha (2011: 6) Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, serta menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dalam suatu wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bertugas menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, serta kemajuan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah.. Menurut Nurcholis (2011: 28) Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur,

mengelola, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berperan dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

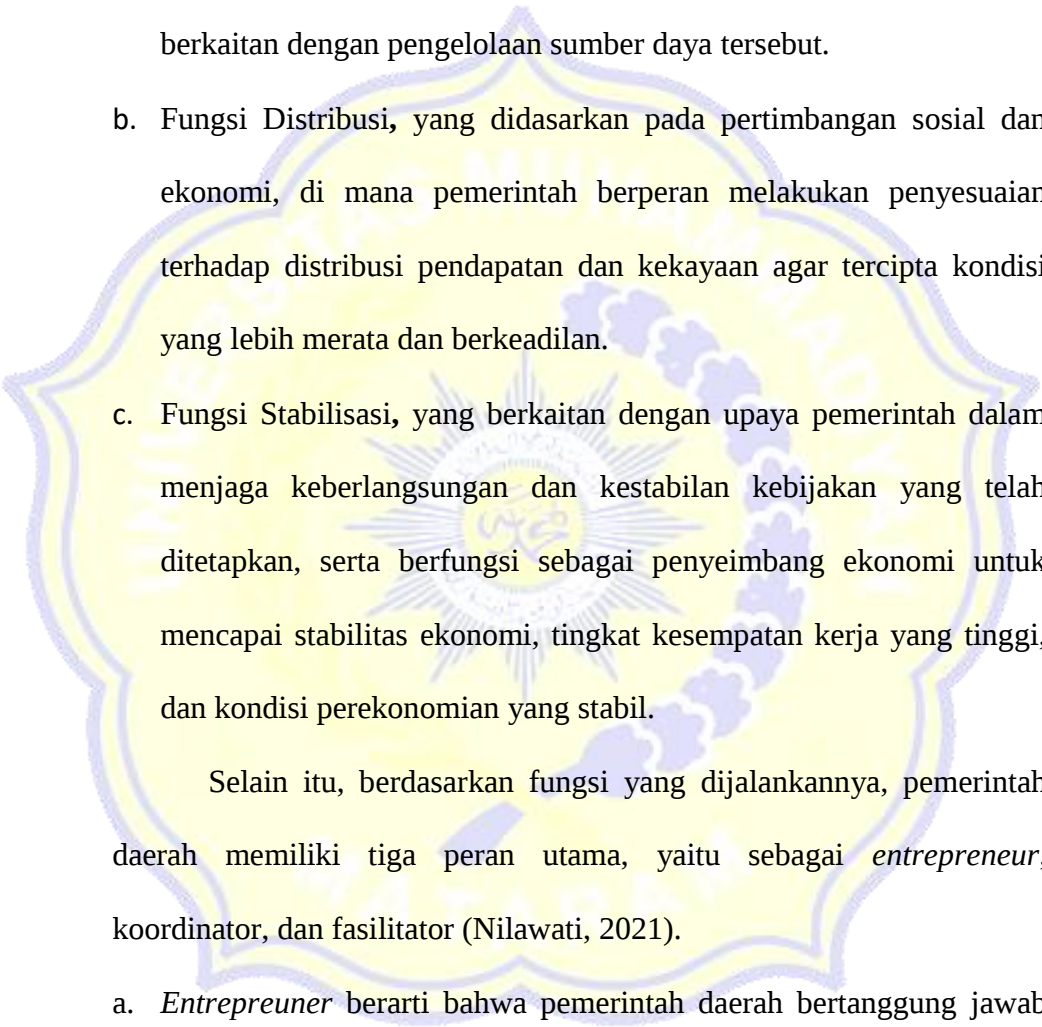
Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan penuh terhadap suatu wilayah yang memegang peranan penting dalam mengatur, mengelola, serta menjaga ketertiban dan keamanan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

3) Peran Pemerintah Daerah

Secara umum, pemerintah daerah memiliki peran dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengatur dan mengelola berbagai urusan di daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran pemerintah mencakup seluruh aktivitas atau upaya yang dilaksanakan secara terkoordinasi, bersumber dari kedaulatan negara, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kenegaraan, yang berkaitan dengan penduduk serta wilayah negara, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (Alfianto, 2021).

Menurut Musgrave dalam Muluk (2009), peran pemerintah terbagi ke dalam tiga fungsi utama, yaitu:

- 
- a. Fungsi Alokasi, yang menunjukkan peran pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya secara optimal. Dalam fungsi ini juga termasuk peran pemerintah dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tersebut.
 - b. Fungsi Distribusi, yang didasarkan pada pertimbangan sosial dan ekonomi, di mana pemerintah berperan melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan agar tercipta kondisi yang lebih merata dan berkeadilan.
 - c. Fungsi Stabilisasi, yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dan kestabilan kebijakan yang telah ditetapkan, serta berfungsi sebagai penyeimbang ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, dan kondisi perekonomian yang stabil.

Selain itu, berdasarkan fungsi yang dijalankannya, pemerintah daerah memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, dan fasilitator (Nilawati, 2021).

- a. *Entrepreneur* berarti bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk berusaha mengelola aset yang merupakan sumber daya ekonomi potensial. Hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

- b. Peran sebagai koordinator tercermin dalam upaya pemerintah daerah mempercepat pembangunan melalui penetapan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, serta mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui upaya memperlancar dan mempercepat pembangunan dengan melakukan perbaikan dalam sikap dan mekanisme pelayanan, seperti percepatan proses perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai upaya memperkuat pengaturan terhadap berbagai aspek khusus dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai peran pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah daerah adalah kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, serta berperan sebagai entrepreneur, koordinator, dan fasilitator untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Pengembangan Desa Wisata

1) Pengertian desa wisata

Menurut Syaifudin dan Ma'ruf (2022: 21), desa wisata adalah desa yang memiliki karakteristik khas berupa potensi asli, baik yang bersumber dari kekayaan alam maupun keunikan sosial dan budaya, sehingga menjadi daya tarik yang tidak selalu dimiliki oleh desa-desa lainnya. Sementara itu, Chakim

(2023: 162) mendefinisikan Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menyajikan suasana khas serta menampilkan potensi asli yang dimiliki desa, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam konteks ini, berbagai aktivitas masyarakat, seperti bertani, berkebun, dan mengolah makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah, dijadikan sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Gautama (2020: 358) Desa wisata merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang berlandaskan pada peran aktif masyarakat serta berorientasi pada prinsip keberlanjutan, di mana desa dijadikan sebagai produk wisata yang mengandung nilai-nilai budaya pedesaan, sehingga proses pengembangannya tetap menjaga dan tidak menghilangkan nilai budaya yang telah ada.

Hermawan (2016: 107) menjelaskan bahwa desa wisata merupakan suatu kawasan yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, seperti tradisi, budaya, serta berbagai potensi yang dikelola secara optimal sebagai daya tarik wisata. Pengelolaan desa wisata dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan tujuan memberikan manfaat bagi kepentingan sosial serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai konsep desa wisata, dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki potensi dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mendukung keberlanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

2) Kriteria desa wisata

Menurut Mahanani dan Listyorini (2021: 157), terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kawasan pedesaan dapat diklasifikasikan sebagai desa wisata. Kriteria-kriteria tersebut meliputi:

- a. Atraksi wisata, yaitu seluruh potensi yang dimiliki desa, meliputi kekayaan alam, budaya, serta hasil kreativitas masyarakat yang menjadi daya tarik yang harus dikelola dan disajikan secara tepat agar mampu memberikan kepuasan bagi wisatawan
- b. Jarak tempuh, yang merujuk pada aksesibilitas desa wisata, baik dari tempat tinggal wisatawan maupun dari pusat pemerintahan daerah atau pusat kabupaten menuju lokasi desa wisata
- c. Besaran desa, yang berkaitan dengan kondisi kuantitatif desa, seperti jumlah penduduk, jumlah rumah, karakteristik masyarakat, serta luas wilayah, yang menjadi landasan utama dalam proses pengembangan dan penetapan suatu desa sebagai desa wisata.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, yang mencakup keberadaan nilai-nilai sosial, adat istiadat, serta agama yang dianut oleh masyarakat desa, karena sistem tersebut masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan pedesaan dan perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata.

e. Ketersediaan infrastruktur, yang meliputi fasilitas pendukung seperti sarana transportasi, jaringan komunikasi, penyediaan air bersih, sistem drainase, serta ketersediaan listrik.

Menurut Buku Pedoman Desa Wisata, Effendi (2019: 29) kriteria berikut harus dipenuhi oleh desa wisata:

- a. Memiliki potensi daya tarik wisata (alam, buatan, maupun budaya)
- b. Memiliki komunitas masyarakat yang berperan aktif
- c. Memiliki kelembagaan yang berfungsi untuk mengelola
- d. Memiliki potensi serta dukungan terhadap ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai guna menunjang aktivitas pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria desa wisata merupakan dasar dalam menetapkan suatu desa sebagai desa wisata dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung pengembangannya. Kriteria tersebut meliputi potensi daya tarik wisata, ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana, serta kegiatan promosi yang berperan dalam meningkatkan perkembangan dan daya saing desa wisata.

3) Pengembangan desa wisata

Dalam upaya mengembangkan pariwisata di suatu daerah, keterlibatan pemerintah secara langsung memiliki peran yang sangat penting. Menurut Budi Margono et al. (2025), Pengembangan pariwisata merupakan serangkaian upaya untuk memajukan suatu kawasan melalui penataan, pemeliharaan potensi yang ada, maupun penciptaan potensi baru. Proses ini dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan sumber daya pariwisata serta

mengintegrasikan berbagai aspek yang mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata.

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan dalam pengembangan desa wisata. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Soemarno (2010) yang menekankan bahwa berbagai aspek pendukung desa wisata harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal tersebut karena desa wisata merupakan bentuk kemandirian masyarakat lokal yang mencerminkan keterpaduan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, Mumtaz dan Karmilah (2021: 3) menjelaskan bahwa desa wisata dibentuk oleh beberapa komponen utama, yaitu pengelolaan dan partisipasi masyarakat, penyediaan edukasi bagi wisatawan, kemitraan dengan berbagai pihak, serta upaya peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Brahmantari et al (2023) mengemukakan bahwa pengembangan desa wisata harus berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Keaslian produk atau atraksi, yaitu kegiatan yang disajikan kepada wisatawan merupakan aktivitas asli yang berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa setempat.
- b. Keberlanjutan tradisi masyarakat, yakni tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh penduduk asli desa
- c. Masyarakat harus terlibat dalam seluruh aktivitas pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

- d. Pelestarian nilai, sikap, dan norma sosial, yang dianut oleh masyarakat sebagai identitas dan daya tarik tersendiri bagi desa wisata.
- e. Konservasi dan daya dukung, yaitu pengembangan desa wisata yang dilaksanakan tanpa menimbulkan kerusakan, baik terhadap kondisi fisik maupun kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Diperlukan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan agar prinsip-prinsip pengembangan desa wisata tetap menjadi pedoman dalam mewujudkan pengembangan yang berkelanjutan di masa mendatang.

4) Strategi pengembangan desa wisata

Menurut Gamal Suwanto (2004: 55) dalam Mamonto (2021: 5), strategi pengembangan pariwisata merupakan upaya yang dilakukan untuk menghasilkan produk dan layanan pariwisata yang berkualitas melalui proses pengembangan yang seimbang dan bertahap.

Menurut Chandler dalam Pradana dan Hamrun (2021: 182), strategi pengembangan terdiri atas empat indikator utama, yaitu:

- a. Sumber daya, yaitu pelaku pariwisata yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.
- b. Dana, merupakan sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pariwisata, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pelatihan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

- c. Informasi dan Teknologi, berperan penting dalam pariwisata dengan memudahkan wisatawan memperoleh informasi destinasi serta mendukung promosi wisata..
- d. Sarana dan Prasarana, merupakan fasilitas pendukung yang menunjang kelancaran kegiatan pariwisata serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat.

2.2.5 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1) Teori-teori pertumbuhan ekonomi

Pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kajian klasik yang telah lama menjadi perhatian para ekonom. Berbagai tokoh telah mengemukakan pandangan, pemikiran, serta teori yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa teori yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Teori pertumbuhan klasik

Adam Smith, melalui karyanya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Menurutnya, salah satu faktor utama yang mendorong pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk, karena peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi penggerak bagi proses pembangunan ekonomi. (Sadono, 2010: 443).

Pandangan Ricardo dan Mill berbeda dengan optimisme Adam Smith mengenai pola dan proses pembangunan ekonomi. Kedua ekonom

klasik tersebut cenderung memiliki pandangan yang lebih pesimistis terhadap arah dan hasil akhir pembangunan dalam jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai kondisi stasioner, yaitu suatu keadaan ketika pembangunan atau pertumbuhan ekonomi tidak lagi mengalami peningkatan sehingga aktivitas ekonomi cenderung berada pada kondisi yang tetap. (Dinar & Hasan, 2018: 244).

b. Berdasarkan pandangan para ekonom klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk, ketersediaan barang modal, luas lahan dan sumber daya alam, serta tingkat perkembangan teknologi. Di antara berbagai faktor tersebut, teori ekonomi klasik menempatkan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

c. Teori pertumbuhan neo-klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Abramovitz dan Solow memandang pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta peningkatan kualitas tenaga kerja, bukan hanya oleh penambahan modal dan jumlah tenaga kerja (Sadono, 2010).

2) Pengertian pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian dalam jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB).

Menurut Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output nasional dalam jangka panjang yang didorong oleh perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada era modern sangat beragam. Namun, para ahli ekonomi umumnya memandang bahwa faktor-faktor produksi merupakan unsur utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Dinar & Hasan, 2018: 244), yang meliputi:

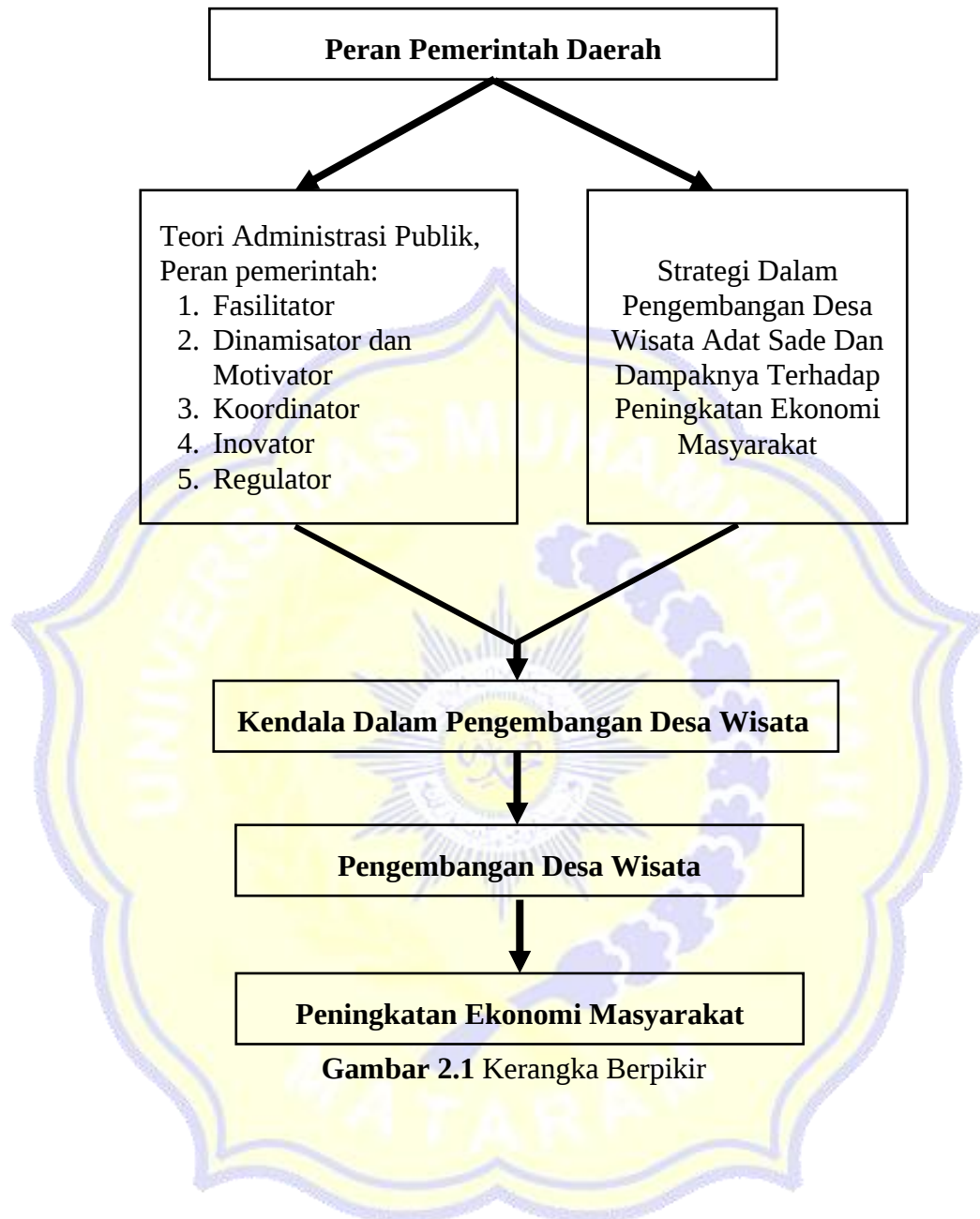
- a. Sumber daya alam, merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak negara berkembang mengandalkan potensi sumber daya alam, seperti lahan subur, hasil tambang, kekayaan laut, dan hutan, sebagai modal pembangunan.
- b. Pembentukan modal atau akumulasi kapital, merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam, mendukung pembangunan, serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kemajuan teknologi, merupakan faktor yang mempercepat pembangunan ekonomi serta berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan ruang lingkup analisis pada beberapa aspek kunci untuk menjaga ketajaman hasil penelitian, yaitu:

1. **Fokus Teori Peran Pemerintah:** Penelitian ini secara spesifik mengkaji dan menganalisis peran pemerintah daerah berdasarkan lima fungsi utama: fasilitator, dinamisator, koordinator, inovator, dan regulator, sebagaimana yang dirujuk dalam landasan teori. Peran pemerintah di luar kelima kategori tersebut tidak termasuk dalam analisis.
2. **Objek dan Lokasi Geografis:** Penelitian ini dibatasi pada implementasi peran pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade yang secara administratif berada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Studi ini tidak mengkaji desa wisata lain di Lombok Tengah.
3. **Kurun Waktu:** Analisis data dan implementasi kebijakan yang diamati dibatasi dalam periode waktu tertentu, misalnya dua tahun terakhir (2022-2025), untuk memastikan relevansi data terhadap kondisi saat ini.
4. **Unit Analisis Subjek:** Data primer dikumpulkan dari pihak-pihak terkait langsung, meliputi perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Desa Rembitan, Pengelola Desa wisata Sade dan Pokdarwis, dan Masyarakat

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, khususnya terkait peran pemerintah daerah dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif dan mendalam melalui proses wawancara serta observasi langsung.

Jenis penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara sistematis berbagai fakta serta karakteristik dari objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dan berlangsung selama dua bulan, dari Desember 2025 hingga Januari 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan, yaitu di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dan di Desa Wisata Adat Sade, Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Pemilihan lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dan di Desa Wisata Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, didasarkan pada beberapa pertimbangan krusial. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada letaknya yang strategis, mudah dijangkau, dan memudahkan peneliti memperoleh informan. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dipilih karena berperan langsung dalam kebijakan dan program pengembangan pariwisata. Sementara itu, Desa Wisata Adat Sade dipilih sebagai objek utama penelitian karena memiliki aktivitas pariwisata yang aktif. Pemilihan kedua lokasi ini membantu peneliti mendapatkan data yang lengkap dan sesuai dengan fokus penelitian.

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini merujuk pada subjek tempat data diperoleh. Dalam pendekatan kualitatif, sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian, yaitu Desa Sade dan instansi terkait. Data

ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung sehingga berasal dari sumber pertama (*first-hand information*) yang bersifat aktual, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Data primer dalam penelitian ini mencakup informasi dari informan kunci berupa keterangan lisan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, data primer juga berasal dari hasil observasi lapangan berupa catatan mengenai kondisi fisik, infrastruktur, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi di Desa Sade. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan serta keterlibatan mereka dalam penelitian.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen atau data yang telah tersedia sebelumnya. Data ini digunakan sebagai pelengkap, pembanding, serta penguat data primer untuk memperkaya analisis penelitian, meskipun diperoleh dari pihak lain dengan tujuan yang berbeda.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Dokumen Resmi Pemerintah dapat berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Peraturan Daerah (Perda) terkait pariwisata. Kemudian Data Statistik seperti Data jumlah kunjungan wisatawan, tingkat pendapatan masyarakat dari pariwisata, dan data demografi masyarakat Desa Rembitan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati objek secara langsung untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi bertujuan melihat secara langsung situasi, aktivitas, dan kondisi Desa Wisata Adat Sade. Dengan demikian, peneliti dapat menilai kondisi desa secara objektif sehingga data yang diperoleh akurat dan mendukung analisis penelitian secara menyeluruh.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade, seperti pemerintah daerah, Kepala Desa Rembitan, Kepala Dusun Sade, Ketua Pokdarwis, dan Ketua Pengelola Desa Wisata, dan Masyarakat yang berperan aktif dalam sektor pariwisata. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta peran masing-masing informan dalam mendukung pengembangan desa wisata.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui berbagai arsip atau bukti tertulis dan visual. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan meliputi gambar kondisi Desa Wisata Adat Sade, catatan sejarah berdirinya desa wisata, daftar program atau kegiatan, data pengunjung, serta dokumen administrasi dari pengelola atau pemerintah daerah. Melalui dokumentasi tersebut, peneliti mendapatkan informasi pendukung tentang perkembangan desa wisata, kegiatan yang dilakukan, dan pengelolaannya secara umum.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu agar permasalahan penelitian dapat dikaji secara tepat. Kualitas data yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan pemahaman informan, karena berperan dalam menentukan keakuratan serta keabsahan informasi yang dikumpulkan.. Sugiyono (2018: 267) menjelaskan bahwa terdapat lima kriteria untuk menentukan informan diantaranya: Harus menguasai dan memahami suatu hal melalui proses enkulturasi atau pembudayaan, berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang diteliti, Memiliki waktu untuk memberikan informasi serta mampu menyampaikan data berdasarkan fakta dan pengalaman yang dimiliki, bukan berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi, serta sebaiknya orang yang relatif asing bagi peneliti, seperti guru atau narasumber eksternal agar partisipasi mereka lebih objektif dan antusias.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menentukan beberapa pihak yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini. Adapun narasumber atau informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan

No.	Nama	Informan	Jabatan
1.	Lalu Sungkul, S. Pd.	Kunci	Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah
2.	Zamzuri, ST.	Kunci	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
3.	Lalu Minaksa	Pendukung	Kepala Desa Rembitan
4.	Amaq Cindage	Pendukung	Kepala Dusun Sade
5.	M. Hariyanto	Pendukung	Ketua Pokdarwis
6.	Thalib	Pendukung	Ketua Pengelola Lokasi Desa Wisata
7.	Masyarakat	Pendukung	Pemandu Wisata, Penenun, dan Penjual Suvenir

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus mulai dari proses pengumpulan data di lapangan sampai tahap penyusunan laporan akhir. Proses analisis tersebut mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu:

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menyeleksi, memfokuskan, mengelompokkan, dan menghilangkan data yang tidak sesuai, serta menyusun informasi secara sistematis agar dapat menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap penyusunan data yang telah melalui proses reduksi ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh sehingga memudahkan dalam memahami kondisi yang terjadi serta menentukan langkah penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pemahaman tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal dalam penelitian bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten selama proses pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah diungkapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

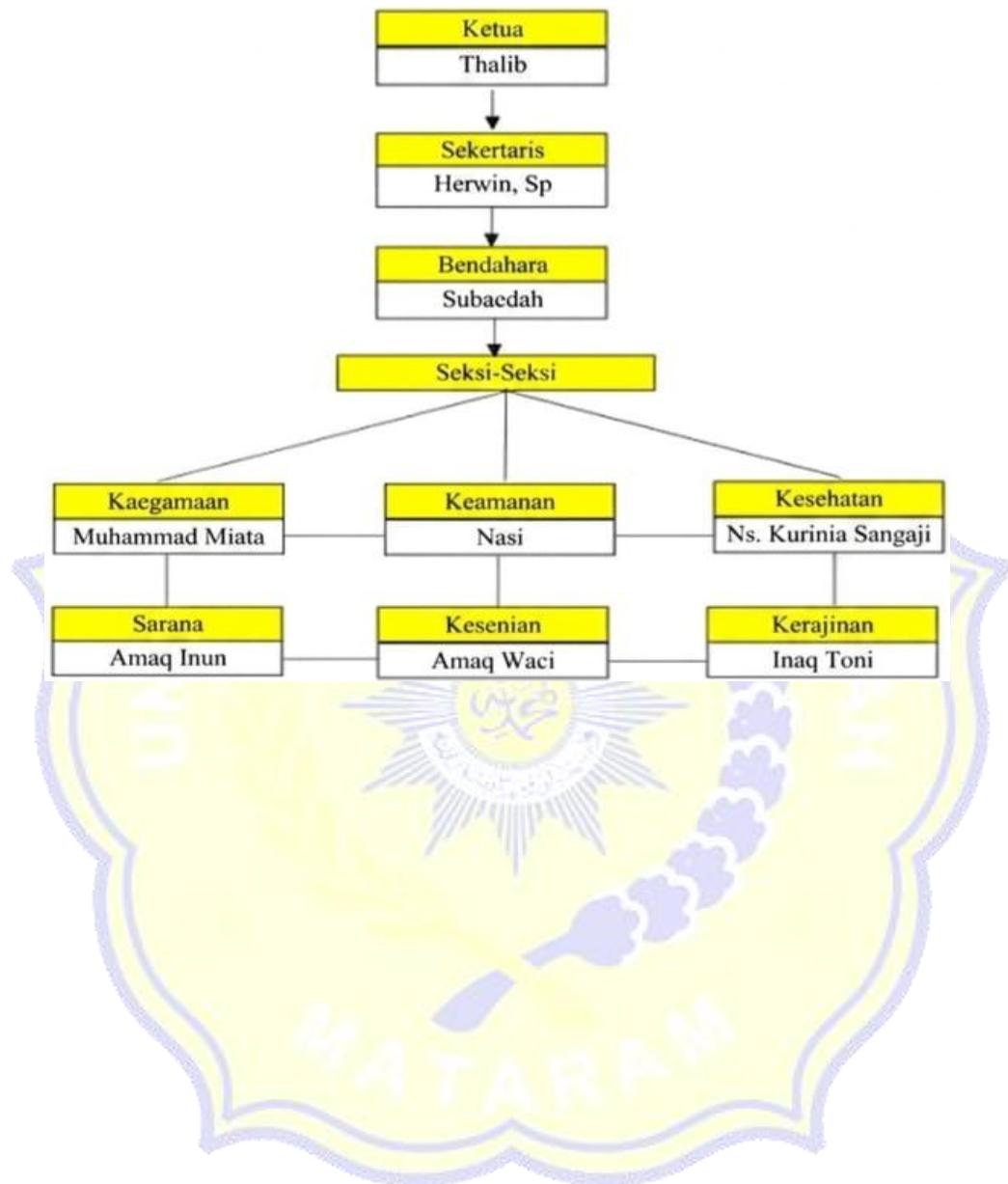
4.1.1 Profil Desa Sade

Sade merupakan salah satu dusun di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang dikenal karena mempertahankan adat istiadat suku Sasak. Keunikan suku Sasak Sade telah menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke Lombok, sehingga Dinas Pariwisata setempat menetapkan Sade sebagai desa wisata. Meskipun terletak di tepi jalan raya yang mulus, penduduk Desa Sade tetap berkomitmen menjaga keaslian dan nilai-nilai tradisional desanya, menjadikannya memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata.

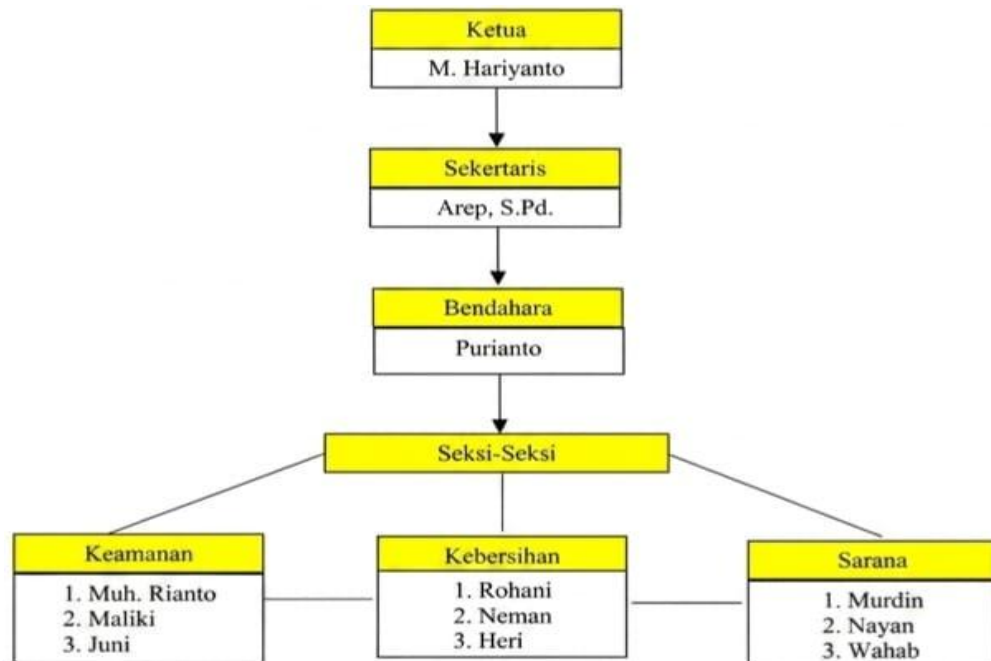
Desa Sade merupakan representasi dari suku asli Sasak di Lombok. Meskipun listrik dan program pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah masuk ke desa ini, Sade tetap mempertahankan suasana perkampungan tradisional. Hal ini tercermin dari bangunan rumahnya yang khas, dengan atap ijuk, rangka atap dari bambu tanpa paku, tembok anyaman bambu, dan lantai tanah, yang disebut oleh masyarakat Sasak Sade sebagai “bale”. Terdapat delapan jenis bale, yakni Bale Tani, Jajar Sekenam, Bonter, Beleq, Berugaq, Tajuk, dan Bencingah, yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Desa ini dihuni oleh sekitar 150 kepala keluarga.

4.1.2 Struktural Pengurus Desa Wisata Adat Sade

Gambar 4.1 Lembaga Pengelola Desa Wisata Sade



Gambar 4.2 Organisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Sade



4.1.3 Lokasi dan Keadaan Dusun Sade

Dusun Sade terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan jarak sekitar 70 km dari Kota Mataram atau sekitar 2 jam perjalanan. Penduduk Dusun Sade merupakan keturunan generasi ke-15 dan berjumlah 529 jiwa, terdiri dari 262 laki-laki dan 267 perempuan. Dusun ini memiliki sekitar 152 kepala keluarga. Dalam peraturan Dusun Sade, tidak terdapat ketentuan yang membatasi jumlah penduduk.

Gambar 4.3 Gerbang Desa Sade



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 4.4 Gapura Desa Sade



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gerbang dan gapura Desa Wisata Adat Sade merupakan salah satu fasilitas pendukung yang berfungsi sebagai identitas sekaligus pintu masuk kawasan wisata. Keberadaan gerbang dan gapura tersebut memberikan informasi kepada wisatawan mengenai lokasi Desa Wisata Adat Sade serta memperkuat citra desa sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Lombok Tengah.

4.1.4 Gambaran Umum Desa Wisata Adat Sade

a. Kondisi Sosial Masyarakat Adat Dusun Sade

Saat ini, Dusun Sade memiliki jumlah penduduk sekitar ± 700 jiwa yang terdiri dari 150 kepala keluarga dan menempati 150 bangunan rumah permanen sebagai tempat tinggal. Jumlah bangunan tersebut tetap dipertahankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tetap dipertahankannya aturan adat, dilakukan pemekaran wilayah Dusun Sade menjadi enam

bagian, yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah (*jeru keliang*).

Kondisi perekonomian masyarakat adat Suku Sasak di Dusun Sade belum memiliki data yang pasti. Namun, berdasarkan kondisi wilayah yang memiliki lahan pertanian yang luas dan dikelilingi oleh kawasan pertanian, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Masyarakat adat Suku Sasak di Dusun Sade masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat

1) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah Pemerintah daerah berperan dengan menyediakan berbagai sumber daya dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah menyediakan sarana prasarana dan Pemerintah melakukan promosi. Sarana dan prasarana pariwisata merupakan komponen pendukung yang berfungsi untuk menunjang dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pariwisata. Pengembangan suatu destinasi wisata tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, promosi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkenalkan, menyebarluaskan, serta meningkatkan daya tarik suatu daerah beserta potensi yang dimilikinya, termasuk dalam bidang pariwisata, kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab.

Lombok Tengah menjelaskan bahwa:

“Sebagai pemerintah daerah, kami terus berupaya mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade melalui penyediaan fasilitas dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada. Fasilitas yang bersifat mendesak menjadi prioritas kami, sementara kekurangan yang masih ada akan terus dievaluasi dan dipenuhi secara bertahap. Selain itu, kami juga melakukan promosi melalui website, media sosial, berbagai event pariwisata, serta bekerja sama dengan pemerintah desa, Pokdarwis, dan pengelola wisata agar Desa Adat Sade semakin dikenal. Namun, kami mengakui bahwa kegiatan promosi, terutama melalui media digital, masih perlu ditingkatkan agar lebih berkelanjutan”.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Kepala Bidang Pengembangan

Destinasi menjelaskan bahwa:

“kami sebagai pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas dasar, namun belum semua kebutuhan fasilitas dapat terpenuhi. Beberapa sarana pendukung masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan Desa Wisata Adat Sade dapat berjalan lebih maksimal. Kami terus berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan perencanaan yang ada. Di sisi lain, promosi destinasi terus dilakukan melalui media sosial, event, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Ke depan, kami akan terus melakukan evaluasi agar penyediaan fasilitas maupun kegiatan promosi dapat berjalan lebih optimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rembitan menjelaskan bahwa:

“Melalui Kami Pemerintah Desa memberikan fasilitas penunjang berupa lahan kepada BUMDES dalam mengelola desa adat sade dan kami juga memberikan fasilitas pendukung lainnya. Namun, kendala kami masalah anggaran yang kami sesuaikan dengan perencanaan awal”.

Sebagai Fasiltator, Pemerintah Daerah telah menjalankan perannya meskipun penyediaan fasilitas dan promosi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran, pemerintah daerah bersama pemerintah desa

terus melakukan evaluasi dan pengembangan secara bertahap. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam pengembangan wisata Desa Adat Sade untuk menunjang pengembangan objek wisata seperti pada Tabel berikut:

Tabel 4.1 Fasilitas Di Desa Wisata Adat Sade

No	Fasilitas	Jumlah
1	Areal Parkir	2
2	Toilet Umum	2
3	Akses Jalan Utama	1
4	Berugaq	6
5	Masjid	1
6	Gapura	2
7	Papan Informasi	1
8	Pos Penerimaan Tamu	1
9	Galeri	1
10	Tempat Sampah	5

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti, 2025 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1, Desa Wisata Adat Sade telah memiliki berbagai fasilitas pendukung, Fasilitas-fasilitas tersebut berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dalam mengelola desa wisata. Namun, beberapa fasilitas masih belum memadai, Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade secara lebih optimal.

Adapun data promosi yang dilakukan Desa wisata Adat Sade yaitu seperti pada Tabel berikut:

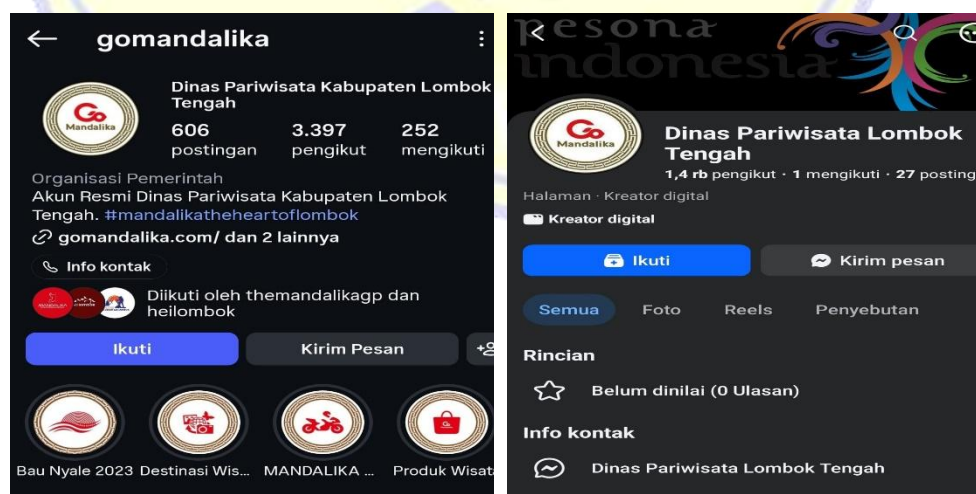
Tabel 4.2 Data Promosi

No.	Jenis Promosi	Keterangan
1.	Media Sosial: a. Website b. Youtube c. Sosial Media	Pemerintah, Pokdarwis, Pengelola dan Pengunjung
2.	Mitra kerja: a. Travel Agent b. Event	Pemerintah, Pokdarwis, Pengelola
3.	Komunikasi langsung	Pemandu Wisata
4.	Promosi Penjualan	Penjual Souvenir dan sejenisnya

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti, 2025 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2, promosi Desa Wisata Adat Sade dilakukan melalui berbagai media dan melibatkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya promosi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga didukung oleh pengelola wisata dan masyarakat setempat dalam memperkenalkan potensi serta daya tarik Desa Wisata Adat Sade.

Gambar 4.5 Media Promosi



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan **Gambar 4.4**, promosi Desa Wisata Adat Sade dilakukan melalui media digital yang dimanfaatkan oleh pemerintah, pengelola, Pokdarwis, serta wisatawan untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan berbagai aktivitas yang ada di Desa Wisata Adat Sade.

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola sade, beliau mengatakan”

“Kami para pengurus beserta pemandu-pemandu wisata lainnya menjelaskan kepada tamu apa yang menjadi daya tarik di desa sade sendiri seperti bangunan rumah adat yang lantainnya masih di baluri dengan kotoran sapi serta kerajinan tangan seperti songket, dan masih banyak lagi”.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Kepala Dusun Sade menjelaskan bahwa:

“Kami bersama para pemandu wisata selalu menjelaskan secara langsung kepada wisatawan mengenai sejarah, budaya, rumah adat, dan kerajinan tenun yang menjadi daya tarik Desa Adat Sade. Promosi dari mulut ke mulut dan melalui media sosial pengunjung cukup membantu, namun kami berharap pemerintah dapat lebih memperkuat promosi digital dan melengkapi fasilitas yang masih kurang agar wisatawan merasa lebih nyaman.”

Salah satu promosi langsung yang dilakukan di Desa Sade yaitu dengan menjelaskan langsung kepada pengunjung. Pengelola dan pemandu wisata telah berperan aktif dalam mempromosikan Desa Wisata Adat Sade dengan menjelaskan secara langsung kepada wisatawan mengenai sejarah, budaya, rumah adat, dan kerajinan tenun sebagai daya tarik utama.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator ini, Peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah telah melaksanakan perannya sebagai

Fasilitator. Namun demikian, masih perlu untuk meningkatkan peran tersebut lebih maksimal. Peran sebagai fasilitator diwujudkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan serta pengembangan potensi pariwisata di wilayahnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan perilaku masyarakat di daerah tersebut (Susi Iswanti & Zulkarnain, 2022).

2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah daerah berperan dalam menggerakkan berbagai pemangku kepentingan (masyarakat, investor, dan pelaku usaha) untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata. agar bisa berjalan baik serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, Pemerintah sudah melaksanakan perannya sebagai Dinamisator.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Pihak Dinas sehubungan dengan upaya sebagai dinamisator tentu Kami memberikan terobosan-terobosan dalam hal menguatkan kesadaran masyarakat secara umum dan khususnya bagi pengelola dan kelompok-kelompok pelaku wisata setempat seperti pokdarwis bagaimana menjaga dan mempertahankan daerah wisatanya dengan baik secara kontinu dengan memberikan layanan prima kepada pengunjung.

Hal tersebut dipertegas oleh kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal ini upaya kami dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan serta pelatihan terkait pelaku wisata yang optimal dengan

menerapkan prinsip-prinsip wisata yang ramah seperti penguatan program sapta pesona. Pemerintah juga dalam hal ini menjalin sinergi positif dengan pengrajin tenun/songket, dan mendukung pentas-pentas seni di lokasi wisata. Kalau di Sade misalnya ada pertunjukan penyambutan baik tari maupun seni musik seperti Gendang Beleg kurang lebih seperti itulah.”.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Rembitan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Desa Adat Sade ini sudah dilakukan dengan memberi dorongan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan Desa Adat Sade. Hanya saja perannya perlu ditingkatkan lebih lagi maskimal dan bisa tetap mempertahknnya”.

Berdasarkan wawancara di atas, peran Pemerintah Daerah sebagai dinamisator memberikan dorongan kepada masyarakat sekitar melalui Pengelola dan Pokdarwis supaya dapat lebih kreatif dan juga dapat memaksimalkan peluang usaha yang ada di daerah sekitar wisata. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan Sapta Pesona, mendukung kegiatan seni budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan Desa Wisata Adat Sade terus berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 4.3 Data Pelatihan Pengelola Wisata Adat Sade

No	Bidang Pelatihan	Program / Kegiatan	Fokus Utama	Instansi Terkait
1	Lingkungan	Program Percontohan Eco Village	Penerapan sistem pengelolaan limbah dan pelestarian alam berbasis adat.	Kemenparekraf

2	Manajemen	Workshop Tata Kelola Destinasi	Standarisasi operasional dan pelaporan keuangan desa wisata.	Dispar Lombok Tengah
3	Keahlian	Sertifikasi Kompetensi Pemandu	Uji kompetensi standar nasional bagi pemandu lokal Sade.	Dispar Lombok Tengah Dan Poltekpar
4	Teknologi	Digitalisasi Pemasaran Desa	Pemanfaatan platform Pintar Kemenparekraf untuk promosi global.	Dispar Lombok Tengah Dan Kominfo
5	Layanan	Pelatihan Hospitality Unggul	Peningkatan etika pelayanan dan penguasaan bahasa asing dasar.	Poltekpar
6	Regulasi	Workshop Kepatuhan Pariwisata	Sosialisasi aturan terbaru mengenai izin dan keamanan wisata 2026.	Dispar Lombok Tengah

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti 2025 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3, Peran pemerintah sebagai dinamisor diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan, pembinaan, pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah bersama berbagai instansi telah menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi masyarakat, Pokdarwis, dan Pengelola Desa Wisata Adat Sade untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Wisata menyatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah juga dalam hal ini bekerjasama dengan Pemerintah desa juga bekerja sama dengan Pengelola dan Pokdarwis Dusun Adat Sade untuk melakukan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keahlian dan senantiasa menjaga lingkungan wisata dan ikut mengelola objek wisata tersebut bersama. Namun, pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah telah menjalankan peran dinamisator dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade, antara lain melalui kegiatan pelatihan dan pemberian pemberdayaan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya lebih optimal. Raintung et al (2021) menyatakan, dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator, pemerintah dituntut memiliki kemampuan untuk memberikan pembinaan, arahan, serta mendorong masyarakat agar tumbuh kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembangunan.

3) Peran Pemerintah sebagai Koordinator

Peran pemerintah sebagai koordinator bertujuan untuk menciptakan kerja sama dan sinergi antara berbagai pihak agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui koordinasi yang baik, potensi desa dapat dikembangkan secara optimal, keterlibatan masyarakat dapat meningkat, serta pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab.

Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk yang kami upayakan dalam mendukung pengembangan wisata yaitu dengan adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta juga karena hal ini penting untuk bekerjasama dengan berbagai elemen-elemen yang ada seperti koordinasi dengan Dinas PU dalam hal perbaikan akses jalan daerah wisata dan Penerangan jalan termasuk juga DLH untuk kebersihan lingkungan”

Hasil wawancara di atas didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah berikut:

“Pihak Dinas intens dalam melakukan koordinasi dalam hal pengembangan daerah wisata. Khususnya wisata desa adat sade seperti koordinasi antar instansi baik itu pemerintah maupun pihak-pihak swasta yang sekiranya bisa mendukung pengembangan wisatanya. Kemudian, Pihak-pihak hotel terdekat dalam menyediakan penginapan bagi pengunjung wisata. Apalagi ketika pergelaran MotoGP penonton juga melakukan tour wisata ke berbagai daerah wisata di Lombok Tengah”.

Sebagai koordinator, pemerintah berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Pemerintah Daerah telah melaksanakan perannya tersebut melalui kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta guna mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade.

Tabel 4.4 Data Koordinasi Desa Wisata Adat Sade

No	Bentuk Koordinasi	Pihak Yang Terlibat
1	Koordinasi perbaikan jalan dan penerangan jalan kawasan wisata	Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Pemerintah Desa
2	Koordinasi kebersihan lingkungan wisata	Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pokdarwis, dan masyarakat

3	Koordinasi promosi wisata	Dinas Pariwisata, agen perjalanan, media, dan pengelola wisata
4	Koordinasi pelaksanaan event budaya	Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan komunitas budaya
5	Koordinasi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata	Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Rembitan, pengelola wisata, dan Pokdarwis

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti 2025 (Diolah)

Berdasarkan **tabel 4.4**, koordinasi dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Sebagai koordinator pemerintah desa bertindak sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Adat Sade dilakukan melalui kerja sama lintas sektor untuk mendukung pengelolaan wisata yang lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan Kepala Desa Rembitan.

“Pemerintah Desa sebagai penghubung antara elemen-elemen lembaga pemerhati wisata dan tentu sekali dengan pemerintah di atas kami seperti Dinas Pariwisata kabupaten dan Provinsi dalam pengelolaan wisata Desa Adat Sade ini. Di samping itu juga kami melakukan gerakan optimal dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pengunjung”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peran pemerintah sebagai koordinator memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan berbagai pihak. Dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak hanya menjadi pengambil keputusan tetapi juga menjadi penggerak dan penyambung kepentingan antar elemen

yang berkaitan dengan pembangunan wisata. Peran pemerintah daerah sebagai koordinator menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai sektor, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaan kebijakan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif. Melalui fungsi koordinasi tersebut, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih kewenangan serta mewujudkan sinergi dan kerja sama yang baik antarinstansi (Soares, 2015).

3) Peran Pemerintah sebagai Inovator

Pemerintah sebagai inovator merupakan peran pemerintah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai pembaruan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. pemerintah sebagai inovator harus mampu menjadi pelopor perubahan dengan menghadirkan gagasan-gagasan baru yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Agar inovasi dapat diterapkan secara efektif, pemerintah perlu memiliki legitimasi, komitmen, serta kemampuan dalam mengelola perubahan sehingga inovasi tersebut dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Untuk para pengelola wisata tentu kami memberikan pemahaman agar memiliki sikap yang kreatif. Karena dengan jiwa tersebut akan memberikan pengaruh besar kepada para pengunjung untuk kembali ke tempat wisata tersebut karena berkesan, dan di zaman yang modern ini pelaku wisata memiliki kompetensi smart tourism dan tentu mempertahankan ciri khas daerah wisatanya”

Hasil wawancara di atas senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi bahwa:

“Bentuk kegiatan inovatif yang kita kembangkan di Wisata Desa Adat Sade yaitu dengan memberikan pemahaman dalam meningkatkan produk wisata dan tata kelola wisata baik serta manajemennya secara kelembagaan serta memperkenalkan Qris kepada pedagang untuk memudahkan transaksi. Kemudian, bagaimana produk wisatanya yang kreatif. Terutama dalam hal penerapan Sapta Pesona Wisata dan Smart Tourism, ini hal yang penting sebagai pendukung akses baik secara nasional maupun internasional”.

Sebagai Inovator, Pemerintah Daerah telah berupaya mendorong inovasi dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade melalui peningkatan kreativitas pengelola, penerapan Smart Tourism, penggunaan QRIS, penguatan tata kelola kelembagaan, serta penerapan Sapta Pesona. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah transaksi, dan memperkuat daya saing Desa Wisata Adat Sade sebagai destinasi wisata budaya. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi, sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4.5 Data Inovasi Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade

No	Bentuk Inovasi	Pelaksana	Tujuan
1	Pembinaan kreativitas pengelola wisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Pokdarwis, dan Pengelola Wisata	Meningkatkan kemampuan pengelola dalam menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik

2	Pengembangan konsep <i>smart tourism</i>	Dinas Pariwisata dan pengelola wisata	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pelayanan wisata.
3	Pelatihan penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM dan pengrajin	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan transaksi non-tunai.
4	Promosi wisata melalui media sosial dan platform digital	Dinas Pariwisata dan pengelola wisata	Memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti 2025 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.5**, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Berbagai inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wisata, memperluas promosi, dan memanfaatkan teknologi digital. Peran pemerintah sebagai inovator diwujudkan melalui berbagai upaya dalam pengembangan Wisata Adat Sade.

Gambar 4.6 Sapta Pesona



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan **Gambar 4.5**, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menerapkan konsep Sapta Pesona sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Penerapan konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan yang baik bagi wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengelola Wisata Desa Adat Sade bahwa:

“Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata dinilai masih bersifat umum dan belum menunjukkan terobosan baru yang signifikan. pemerintah dinilai perlu menghadirkan inovasi yang lebih kreatif, berbasis potensi lokal, serta melibatkan masyarakat secara aktif agar mampu memberikan nilai tambah nyata bagi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. beberapa inovasi yang kami lakukan seperti mengajak para pengunjung untuk mencoba menenun di lokasi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade dinilai belum optimal dalam hal inovasi, karena masih bersifat umum dan belum

menghadirkan terobosan baru. Inovasi yang lebih kreatif, berbasis potensi lokal, dan melibatkan masyarakat secara aktif masih perlu diperkuat. Hal ini sebagaimana dalam Lobbu et al (2018), dalam menjalankan perannya sebagai inovator, pemerintah dituntut untuk menjadi penggerak lahirnya berbagai gagasan, kebijakan, dan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Agar peran tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah harus memiliki tingkat legitimasi yang tinggi sehingga memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

4) Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menetapkan arah dan aturan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan berbagai kebijakan atau peraturan. Dalam peran ini, pemerintah memberikan aturan dasar kepada masyarakat sebagai acuan dalam mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Yang namanya daerah wisata tentu ada aturan yang mendasar sebagai batasan-batasan dalam pengelolaannya. Seperti penetapan kebijakan sebagai dasar melakukan operasional, dalam menjaga warisan budaya tentu harus ada kebijakan tata kelola ruang termasuk tata kelola ekonomi dan pendapatan di daerah wisata”

Hasil wawancara di atas didukung dengan pernyataan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi bahwa:

“Pihak dinas memiliki otoritas penuh dalam penetapan aturan dan kebijakan termasuk SOP, pemerintah daerah telah menetapkan aturan dalam pengelolaan Desa Wisata Adat Sade yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan nilai budaya serta adat istiadat

setempat. Salah satu bentuknya adalah membatasi pembangunan bangunan modern di kawasan Desa Wisata Adat Sade karena tidak boleh dilakukan secara bebas dan harus menyesuaikan dengan karakter budaya dan tata ruang tradisional yang telah ada.”

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pariwisata telah menunjukkan upaya dalam penyusunan regulasi teknis untuk mendukung kegiatan wisata. Namun, regulasi yang dibuat masih bersifat umum dan belum memiliki turunan kebijakan yang mengatur mengenai pembinaan berkelanjutan.

Tabel 4.6 Data Regulasi Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade

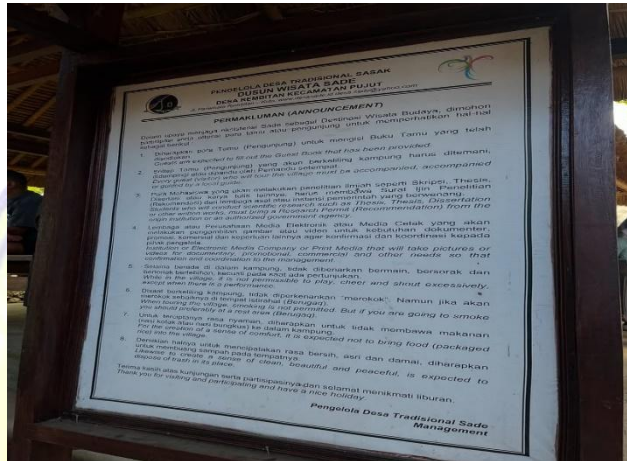
No	Regulasi/Kebijakan	Pelaksana	Tujuan
1	Penetapan Desa Adat Sade sebagai destinasi wisata budaya	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Memberikan dasar hukum dalam pengelolaan Desa Wisata Adat Sade.
2	Penyusunan aturan tata tertib bagi wisatawan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Pemerintah Desa, Dan Pengelola	Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan wisatawan
3	Pengaturan pelestarian rumah adat dan budaya Sasak	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Melindungi keaslian budaya dan menjaga identitas Desa Adat Sade.
4	Pengaturan pelaksanaan kegiatan budaya dan atraksi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Pemerintah Desa, Dan Pengelola	Menjaga kelestarian budaya meningkatkan daya tarik wisata

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti 2025 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.6**, Peran pemerintah sebagai regulator diwujudkan melalui penyusunan berbagai aturan yang berkaitan dengan tata

kelola wisata yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan Desa Wisata Adat Sade yang tertib, berkelanjutan, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal.

Gambar 4.7 Aturan di Desa Wisata Sade



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan **Gambar 4.6**, Desa Wisata Adat Sade menerapkan berbagai aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelestarian budaya. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi wisatawan maupun masyarakat agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan tertib serta tetap menghormati nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku di Desa Wisata Adat Sade.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rembitan menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan pengelola telah menetapkan aturan larangan membawa senjata tajam dan obat-obatan terlarang bagi setiap pengunjung yang memasuki kawasan Desa Wisata Adat Sade. Aturan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kawasan wisata, baik bagi pengunjung maupun masyarakat setempat. Desa Adat Sade harus dijaga kondusivitasnya, sehingga diperlukan pembatasan terhadap barang-barang yang berpotensi membahayakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Sade menyatakan bahwa:

“Aturan larangan tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat dan pengunjung. Kepala Dusun menyampaikan bahwa pengunjung yang datang ke Desa Wisata Adat Sade diimbau untuk tidak membawa senjata tajam maupun obat-obatan terlarang, karena dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan desa. Aturan ini diterapkan untuk melindungi masyarakat adat serta menjaga citra Desa Wisata Adat Sade sebagai kawasan wisata yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Peran pemerintah sebagai regulator sudah melaksanakan perannya sesuai makna dari peran yang dimaksud yaitu dengan membuat kebijakan dan peraturan sesuai SOP. Peran pemerintah sebagai regulator diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan berbagai peraturan serta kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah memberikan landasan dan acuan bagi masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur serta mengarahkan pelaksanaan berbagai kegiatan (Kurniawan, 2023).

4.2.2 Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat

1) Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Desa Wisata Sade

Strategi pemerintah Kabupaten dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade dilaksanakan melalui beberapa aspek utama, yaitu promosi wisata, pengembangan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan digitalisasi pariwisata. Berikut adalah strategi yang dilakukan:

a. Strategi Peningkatan Promosi Wisata

Promosi wisata merupakan salah satu strategi utama yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Pemerintah menyadari bahwa promosi memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, beliau menjelaskan:

"Selama ini promosi menjadi salah satu fokus utama kami karena Desa Adat Sade merupakan salah satu ikon wisata budaya di Lombok Tengah. Kami melakukan promosi melalui media sosial, website pariwisata, pameran pariwisata, serta kerja sama dengan travel agent. Hampir seluruh paket wisata yang masuk ke kawasan Mandalika biasanya juga memasukkan Desa Sade sebagai salah satu destinasi kunjungan wisatawan. Selain itu kami juga memanfaatkan berbagai event untuk memperkenalkan Desa Sade kepada wisatawan yang lebih luas."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa strategi promosi telah berjalan cukup baik karena mampu mempertahankan Desa Wisata Adat Sade sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal di Lombok Tengah.

Tabel 4.7 Data Strategi Promosi

No	Bentuk Promosi	Pelaksanaan
1	Media Sosial	Dilaksanakan belum rutin
2	Kerja Sama Travel Agent	Sudah Berjalan
3	Event Pariwisata	Dilaksanakan setiap ada event
4	Website	Sudah tersedia

Sumber: Hasil wawancara dan observasi peneliti 2026 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.7**, strategi promosi telah dilaksanakan dan mempertahankan Desa Adat Sade sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal di Lombok Tengah. Namun promosi berbasis digital masih perlu diperkuat agar mampu menjangkau wisatawan yang lebih luas.

b. Strategi Peningkatan Fasilitas Wisata

Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengembangan fasilitas sebagai upaya meningkatkan kenyamanan wisatawan selama berkunjung ke Desa Wisata Adat Sade. Penyediaan fasilitas dianggap penting karena berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, beliau menyampaikan:

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung wisata sesuai kebutuhan di lapangan. Beberapa fasilitas yang ada sangat penting untuk mendukung aktivitas wisatawan selama berada di Desa Sade. Namun kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan, kebutuhan terhadap fasilitas juga semakin besar. Oleh karena itu pengembangan fasilitas dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian terhadap penyediaan fasilitas wisata sebagai upaya mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade.

Tabel 4.8 Data peningkatan Fasilitas Wisata:

No	Fasilitas	Kondisi Saat Ini
----	-----------	------------------

1	Areal Parkir	Tersedia
2	Toilet Umum	Belum Memadai
3	Akses Jalan	Tersedia
4	Tempat Istirahat Wisatawan	Masih Terbatas
5	Penerang Jalan Umum	Tersedia

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti 2026 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.8**, strategi pengembangan fasilitas telah memberikan dampak terhadap kenyamanan wisatawan. Penyediaan dan peningkatan berbagai fasilitas pendukung menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman berkunjung dengan lebih nyaman.

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting yang dilakukan pemerintah daerah karena masyarakat merupakan aktor utama dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, menjelaskan bahwa:

"Kami selalu berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap program pengembangan pariwisata. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kami terus

mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wisata, karena manfaat ekonomi yang diperoleh nantinya akan kembali dirasakan oleh masyarakat itu sendiri."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terlibat secara aktif.

Tabel 4.9 Data pemberdayaan masyarakat

No	Jenis Pelatihan	Tujuan
1	Pelatihan Kompetensi Pemandu Wisata	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberikan pelayanan
2	Pelatihan Pemasaran Digital	Mendukung promosi wisata
3	Pelatihan Hospitality	Untuk meningkatkan etika pelayanan dan penguasaan bahasa asing.
4	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata	Meningkatkan kemampuan pengelolaan wisata

Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti 2026 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.9**, strategi pemberdayaan masyarakat cukup berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui keikutsertaan dalam berbagai aktivitas pariwisata dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade.

d. Strategi Pelestarian Budaya Lokal

Pelestarian budaya merupakan strategi yang sangat penting dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade karena budaya dan tradisi masyarakat Sasak merupakan daya tarik utama yang dimiliki desa tersebut. Dengan menjaga kelestarian budaya, identitas lokal tetap terpelihara sekaligus menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi:

"Keunggulan utama Desa Sade dibandingkan destinasi lain adalah budaya dan adat istiadatnya yang masih terjaga sampai sekarang. Oleh karena itu pemerintah berupaya menjaga keaslian budaya tersebut melalui berbagai pembinaan dan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal. Kami juga berupaya menjaga keberadaan rumah adat, tradisi menenun, serta adat istiadat masyarakat Sasak agar tetap dipertahankan. Selain itu terdapat pembatasan terhadap pembangunan bangunan modern di kawasan Desa Sade karena harus tetap menyesuaikan karakter budaya yang sudah ada."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa strategi pelestarian budaya menjadi fokus utama Pemerintah Daerah dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan kepada masyarakat, penerapan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal, serta menjaga keaslian rumah adat, tradisi menenun, dan adat istiadat masyarakat Sasak. Selain itu, pemerintah juga membatasi pembangunan bangunan modern agar tetap selaras dengan karakter budaya Desa Sade.

Gambar 4.8 Rumah Adat



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 4.9 Menenun



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 4.10 Presean



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 4.11 Gendang Beleq



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar di atas, Desa Wisata Adat Sade memiliki berbagai potensi budaya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, seperti rumah adat Sasak, kegiatan menenun, atraksi budaya Peresean, dan pertunjukan Gendang Beleq. Berbagai potensi budaya tersebut masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas serta warisan budaya yang dimiliki Desa Sade. Keberadaan rumah adat yang masih asli, tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun, serta

pertunjukan seni dan budaya yang rutin ditampilkan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga kelestarian budaya lokal.

Tabel 4.10 Data pelestarian budaya lokal

No	Bentuk Pelestarian	Pelaksanaan
1	Pelestarian Rumah Adat	Berjalan
2	Pelestarian Tradisi	Berjalan
3	Pelestarian Adat Istiadat	Berjalan
4	Pembatasan Bangunan Modern	Berjalan

Sumber: Sumber: Data observasi dan wawancara peneliti 2026 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.10**, strategi pelestarian budaya berjalan dengan baik dan menjadi faktor utama yang membuat Desa Wisata Adat Sade tetap menarik bagi wisatawan. Keaslian budaya yang masih terjaga menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan desa wisata lainnya. Hal ini terlihat dari tetap dipertahankannya rumah adat, tradisi menenun, serta berbagai atraksi budaya yang menjadi ciri khas Desa Sade.

2) Dampak Pengembangan Desa Wisata Adat Sade

Dampak pengembangan Desa Wisata Adat Sade merupakan perubahan yang ditimbulkan dari kegiatan pengembangan desa wisata terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui bertambahnya peluang usaha, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak yang paling dirasakan adalah

meningkatnya pendapatan, Meningkatnya penjualan produk lokal, dan meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

a. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Masyarakat mengakui bahwa keberadaan Desa Wisata Adat Sade memberikan tambahan pendapatan dibandingkan sebelum berkembangnya sektor pariwisata. Meningkatnya jumlah wisatawan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjual berbagai produk lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nim selaku penjual tenun, beliau menyatakan bahwa:

“Sejak Desa Sade semakin dikenal wisatawan, hasil penjualan tenun kami juga ikut meningkat. Kalau wisatawan ramai, biasanya penjualan lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ardinata selaku penjual souvenir, beliau menyatakan bahwa:

“Pariwisata sangat membantu perekonomian kami. Penghasilan memang tidak selalu sama setiap hari, tetapi adanya wisatawan membuat kami memiliki sumber pendapatan yang lebih baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Thalib selaku pemandu wisata, beliau menyatakan bahwa:

“Pariwisata memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sebagai pemandu wisata. Penghasilan yang kami terima mengikuti jumlah wisatawan yang datang. Meskipun tidak selalu sama setiap hari, pekerjaan ini sangat membantu meningkatkan pendapatan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengembangan desa wisata telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas

pariwisata. Semakin berkembangnya kegiatan wisata mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk tenun, souvenir, serta jasa pemandu wisata.

Tabel 4.11 Data Pendapatan Masyarakat Tahun 2022–2025

No	Tahun	Kondisi Pendapatan	Alasan
1	2022	Mulai meningkat	Aktivitas pariwisata kembali berjalan sehingga masyarakat mulai memperoleh pendapatan dari penjualan tenun, souvenir, dan jasa pemandu wisata.
2	2023	Meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan bertambah sehingga penjualan produk lokal dan permintaan jasa pemandu wisata ikut meningkat.
3	2024	Semakin meningkat	Desa Wisata Adat Sade semakin dikenal sebagai destinasi wisata budaya sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih berkembang.
4	2025	Terus meningkat	Masyarakat semakin aktif mengembangkan usaha tenun, souvenir, dan jasa wisata sehingga peluang memperoleh pendapatan semakin besar.

Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti, 2026 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.11, kondisi pendapatan masyarakat di Desa Wisata Adat Sade menunjukkan kecenderungan terus meningkat selama periode 2022–2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kembali

normalnya aktivitas pariwisata yang mendorong bertambahnya kunjungan wisatawan. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap penjualan kain tenun, souvenir, serta meningkatnya permintaan jasa pemandu wisata.

b. Peningkatan Penjualan Produk Lokal

Pengembangan desa wisata telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penjualan produk lokal. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung membuka peluang pasar yang lebih luas bagi masyarakat untuk memasarkan berbagai produk khas Desa Sade, terutama kain tenun dan souvenir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sahnim selaku penjual souvenir, beliau menyatakan bahwa:

“Dengan adanya wisatawan yang datang ke Desa Sade, penjualan souvenir menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Wisatawan biasanya membeli beberapa souvenir sebagai oleh-oleh, sehingga usaha kami tetap berjalan dan memberikan tambahan penghasilan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Fanu selaku penjual tenun, beliau menyatakan bahwa:

“Wisatawan yang datang biasanya melihat proses menenun dan ada juga yang membeli kain tenun. Penjualan memang mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, tetapi jumlahnya tergantung pada banyaknya wisatawan yang berkunjung.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan Desa Wisata Adat Sade telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan produk lokal. Meningkatnya jumlah wisatawan tidak hanya memperluas pasar bagi produk-produk lokal, tetapi

juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata.

Tabel 4.12 Data Penjualan Produk Lokal Tahun 2022–2026

No	Tahun	Kondisi Penjualan Produk Lokal
1	2022	Penjualan mulai meningkat setelah pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi.
2	2023	Penjualan meningkat seiring bertambahnya kunjungan wisatawan.
3	2024	Penjualan semakin berkembang didukung promosi wisata dan kawasan Mandalika.
4	2025	Penjualan tetap meningkat, terutama pada musim liburan dan saat event internasional

Sumber: Hasil wawancara dan observasi peneliti 2026 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.12**, penjualan produk lokal menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Adat Sade telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemasaran produk lokal yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

c. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pengembangan Desa Wisata Adat Sade juga menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Masyarakat tidak hanya bekerja sebagai petani atau buruh, tetapi juga memiliki kesempatan bekerja dalam sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Hanafi selaku pemandu wisata, beliau menyatakan bahwa:

"Dengan adanya wisatawan yang datang ke Desa Sade, kami mempunyai kesempatan bekerja sebagai pemandu wisata. Selain itu, banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan wisata sehingga dapat memperoleh penghasilan tambahan."

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sahrum selaku penjual souvenir, beliau menyatakan bahwa:

"Desa Wisata Adat Sade memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Ada yang bekerja sebagai penenun, penjual souvenir, dan pemandu wisata. Dengan adanya wisatawan, kami bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata telah menciptakan lapangan kerja baru yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan desa wisata memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Tabel 4.13 Data Kesempatan Kerja Tahun 2022–2026

No	Tahun	Pemandu Wisata	Penjual Tenun	Penjual Souvenir	Total
1	2022	55	45	47	147
2	2023	57	53	52	162
3	2024	60	55	60	175
4	2025	63	57	68	188

Sumber: Hasil wawancara dan observasi peneliti 2026 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 4.13**, kesempatan kerja di sektor pariwisata Desa Wisata Adat Sade mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai pemandu wisata, penjual tenun, dan penjual souvenir terus bertambah setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Adat Sade telah membuka lebih

banyak peluang kerja bagi masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

d. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya

Pengembangan Desa Wisata Adat Sade juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Masyarakat menyadari bahwa budaya dan tradisi yang dimiliki merupakan daya tarik utama bagi wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lena selaku penjual Tenun, beliau menyatakan bahwa:

"Kami semakin sadar bahwa budaya dan tradisi yang kami miliki harus dijaga karena itulah yang membuat wisatawan tertarik datang ke Desa Sade."

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya yang dimiliki.

4.2.3 Kendala Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade

Dalam perkembangan pariwisata di Desa Wisata Adat Sade, setiap desa tidak hanya menghadapi faktor pendukung, tetapi juga terdapat kendala yang memengaruhi perkembangan pariwisata. Kendala-Kendala ini mencakup kondisi lingkungan yang kurang maksimal mendukung.

1) Pemahaman dan wawasan dalam hal digitalisasi

Salah satu kendala utama dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade adalah Sebagian pengelola dan masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan media sosial, promosi online, serta sistem digital lainnya belum dilakukan secara optimal,

sehingga informasi tentang Desa Wisata Adat Sade belum menjangkau wisatawan secara luas.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, baik untuk promosi maupun transaksi. Sebagian masyarakat masih lebih terbiasa menggunakan cara konvensional”.

Hasil wawancara di atas didukung dengan pernyataan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi bahwa:

“Kami terus memberikan pelatihan mengenai pemasaran digital dan penggunaan pembayaran non-tunai agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pariwisata saat ini.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat memiliki kemampuan dalam bidang digital. pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat Desa Wisata Adat Sade masih belum optimal, terutama dalam promosi dan transaksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Daerah terus memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengikuti perkembangan sektor pariwisata.

2) Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata Adat Sade masih belum sepenuhnya memadai. Beberapa sarana pendukung, seperti papan informasi, tempat istirahat, dan fasilitas kenyamanan wisatawan, masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas. Keterbatasan fasilitas ini dapat memengaruhi kenyamanan pengunjung dan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah terus berupaya melengkapi fasilitas pendukung, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah, meskipun ada beberapa fasilitas dasar yang sudah tersedia, perbaikan dan pembangunan infrastruktur lebih lanjut masih sangat diperlukan, sehingga diperlukan upaya terus memperbaiki fasilitas”.

Dalam rangka mengatasi kendala ini. Dinas pariwisata yang berbasis pada prinsip keberlanjutan harus menjadi fokus utama, dengan perhatian pada pelestarian alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan wisata. Untuk itu, perlu terus berinovasi dan memperbaiki fasilitas serta menambah atraksi baru untuk menjaga relevansi di pasar pariwisata.

Hasil wawancara di atas didukung dengan pernyataan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi bahwa:

“Beberapa fasilitas sudah tersedia, tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi wisatawan.”

Berdasarkan hasil wawancara pada aspek fasilitas penunjang, menunjukkan bahwa fasilitas pendukung telah tersedia, namun masih memerlukan pengembangan agar pelayanan kepada wisatawan menjadi lebih baik dan aktivitas pariwisata semakin nyaman.

3) Kunjungan wisatawan Berbasis Event

Kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Adat Sade masih bergantung pada kegiatan atau event tertentu. Pada saat tidak terdapat kegiatan khusus, jumlah kunjungan wisatawan cenderung menurun. Ketergantungan pada event ini menyebabkan pendapatan pariwisata belum stabil dan berkelanjutan, sehingga

diperlukan strategi pengelolaan yang mampu menarik wisatawan secara konsisten sepanjang tahun.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Tidak bisa kita hindari memang untuk pengunjung wisata yang lebih besar saat ini masih bergantung pada event-event internasional maupun nasional. Hal ini memang menjadi kendala jangka panjang. Adapun nanti ke depannya akan kita gunakan metode-metode strategis dalam memperbanyak pengunjung wisata di daerah kita”.

Hasil wawancara di atas didukung dengan pernyataan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi bahwa:

“Event ini sudah menjadi hal paling kuat dalam mempengaruhi pengunjung wisatawan di daerah wisata. Sehingga masih kita upayakan bersama dinas pariwisata agar memperbanyak event dan menerapkan cara strategis lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terkait dengan kunjungan wisatawan berbasis event menjadi kendala yang berpengaruh secara signifikan atas kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Adat Sade. Kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Adat Sade masih dipengaruhi oleh penyelenggaraan event nasional maupun internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan jumlah event serta menyusun berbagai strategi untuk menarik wisatawan secara lebih berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Sade

1) Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendukung wisata dan promosi wisata untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Dalam aspek fasilitas, fasilitas yang diberikan meliputi perbaikan akses jalan menuju kawasan wisata, area parkir, penerangan jalan, papan informasi, toilet umum, serta sarana pendukung lainnya. Dalam aspek promosi, pemerintah aktif memperkenalkan Desa Wisata Adat Sade melalui media sosial, website pariwisata, kerja sama dengan agen perjalanan, dan event pariwisata. Masih terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai serta promosi yang belum dilakukan secara maksimal sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat belum sepenuhnya merata. Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran fasilitator yang dilakukan pemerintah masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa fasilitas penunjang wisata masih terbatas dan belum memadai serta promosi digital yang dilakukan juga masih belum berjalan secara konsisten.

2) Peran Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah upaya pemerintah dalam menggerakkan, mendorong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade agar masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata. Pemerintah melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat, pengelola wisata, dan Pokdarwis. Berbagai pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam mengelola wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Meskipun demikian, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan belum berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berperan sebagai dinamisor dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan wisata, pembinaan yang lebih berkelanjutan masih diperlukan agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat.

3) Peran Pemerintah Daerah sebagai Kordinator

Peran pemerintah sebagai koordinator adalah upaya pemerintah dalam menghubungkan berbagai pihak agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade diperlukan untuk menciptakan sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut membantu mendukung pengembangan Desa Wisata Adat Sade, terutama dalam penyediaan infrastruktur, kebersihan lingkungan, dan pengembangan usaha masyarakat. Namun, koordinasi yang dilakukan masih belum berjalan secara rutin dan terstruktur sehingga sinergi antar pihak belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi koordinasi dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade, tetapi masih diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar kerja sama antar pihak dapat berjalan lebih efektif.

4) Peran Pemerintah Daerah sebagai Inovator

Peran pemerintah sebagai inovator adalah menciptakan berbagai pembaruan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan daya tarik destinasi wisata. Inovasi diperlukan agar desa wisata mampu mengikuti perkembangan kebutuhan wisatawan dan perkembangan teknologi. Bentuk inovasi yang telah dilakukan antara lain pelatihan digital marketing, penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, serta pelatihan penggunaan QRIS untuk mendukung transaksi non-tunai bagi pelaku usaha dan pengrajin serta mendorong penerapan konsep *smart tourism* melalui pemanfaatan teknologi digital. Inovasi yang dilakukan masih belum optimal karena masih bersifat umum dan belum menghadirkan terobosan baru. Pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan peran sebagai inovator melalui berbagai pembaruan dalam pengelolaan wisata. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap teknologi masih diperlukan agar inovasi yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

5) Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Desa Adat Sade dalam perkembangannya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari kepentingan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah. Desa Adat Sade ini termasuk lokasi kunci tujuan wisatawan di area Kecamatan Pujut yang menjadi cagar budaya etnik Suku Sasak (RIPARDA Kab Lombok Tengah, 2016).

Peran pemerintah sebagai regulator dilakukan melalui penyusunan aturan dan kebijakan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan desa wisata. Regulasi bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelestarian budaya dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan terkait pengelolaan Desa Wisata Adat Sade. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan mampu menjaga kelestarian budaya dan menciptakan kondisi wisata yang aman serta tertib. Namun, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi masih belum optimal sehingga efektivitas beberapa aturan belum dapat diukur secara maksimal. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan peran sebagai regulator dengan menetapkan berbagai aturan dalam pengelolaan wisata, penguatan pengawasan dan evaluasi masih diperlukan agar pelaksanaan regulasi dapat berjalan efektif.

4.3.2 Strategi pengembangan Desa Wisata Adat Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1) Strategi Pengembangan Desa Wisata Sade

a. Strategi Peningkatan Promosi Wisata

Promosi wisata merupakan salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan Desa Wisata Adat Sade. Promosi dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, website pariwisata, kerja sama dengan travel agent, dan kegiatan event pariwisata. Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan Desa Adat Sade kepada wisatawan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. Namun

demikian, promosi melalui media digital masih belum berjalan secara maksimal karena pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin. Pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan media digital agar Desa Adat Sade dapat menjangkau wisatawan yang lebih luas.

b. Strategi Peningkatan Fasilitas Wisata

Pemerintah melakukan pengembangan fasilitas wisata sebagai upaya meningkatkan kenyamanan wisatawan karena fasilitas sangat penting untuk mendukung aktivitas wisatawan selama berkunjung ke Desa Adat Sade. Namun, beberapa fasilitas masih memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti toilet umum yang belum memadai dan tempat istirahat wisatawan yang masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas telah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar wisatawan merasa lebih nyaman dan betah saat berkunjung ke Desa Adat Sade.

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan, seperti pelatihan pemandu wisata, pemasaran digital, hospitality, dan tata kelola destinasi wisata. Masyarakat mulai terlibat sebagai pemandu wisata, penjual tenun, pedagang suvenir, dan berbagai usaha lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dan masih memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi digital. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi perkembangan

pariwisata yang semakin modern.

d. Strategi Pelestarian Budaya

Pemerintah berupaya menjaga dan melestarikan budaya dilakukan dengan menjaga keberadaan rumah adat, mempertahankan tradisi menenun, melestarikan adat istiadat masyarakat Sasak, serta membatasi pembangunan bangunan modern yang tidak sesuai dengan karakter budaya setempat. Strategi ini terbukti mampu menjaga keaslian Desa Adat Sade sehingga tetap menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang diminati wisatawan. Keberhasilan dalam menjaga budaya lokal juga menjadi modal penting bagi keberlanjutan pengembangan pariwisata di Desa Adat Sade karena budaya merupakan daya tarik utama yang dimiliki.

2) Dampak Pengembangan Desa Wisata Adat Sade

a. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Pengembangan Desa Wisata Adat Sade memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kehadiran wisatawan yang terus berkunjung membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui berbagai aktivitas dari kegiatan pariwisata. sebagian besar pelaku pariwisata merasakan adanya peningkatan pendapatan dibandingkan sebelum sektor pariwisata berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Meningkatnya Penjualan Produk Lokal

Pengembangan Desa Wisata Adat Sade memberikan dampak terhadap peningkatan penjualan produk lokal masyarakat. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati budaya dan rumah adat, tetapi juga membeli produk lokal sebagai oleh-oleh. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi para pengrajin dan pedagang yang menggantungkan pendapatannya pada penjualan produk lokal. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi juga mendorong pelestarian produk budaya lokal.

c. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pengembangan Desa Wisata Adat Sade turut menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat masyarakat kini dapat bekerja sebagai pemandu wisata, penjual tenun dan pedagang souvenir. Bertambahnya kesempatan kerja ini membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan memberikan sumber penghasilan tambahan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Adat Sade.

d. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melestariakan Budaya

Pengembangan Desa Wisata Adat Sade juga berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Masyarakat menyadari bahwa budaya dan tradisi yang dimiliki merupakan daya tarik utama yang membedakan Desa Adat Sade

dengan destinasi wisata lainnya. Masyarakat berupaya menjaga identitas budaya Sasak sebagai aset wisata yang bernilai tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya.

4.3.3 Kendala Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Terhadap

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Meskipun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan berbagai peran, proses pengembangan Desa Wisata Adat Sade terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Pemahaman dan wawasan dalam hal digitalisasi

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Sebagian pelaku usaha, seperti pengrajin tenun dan penjual souvenir, masih mengandalkan penjualan secara langsung kepada wisatawan. Selain itu, penggunaan media sosial, pemasaran digital, serta transaksi non-tunai seperti QRIS belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan jangkauan pemasaran produk masih terbatas. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pelatihan pemasaran digital, penggunaan media sosial, dan sistem pembayaran digital kepada masyarakat.

2) Fasilitas penunjang

Fasilitas pendukung di Desa Wisata Adat Sade masih perlu ditingkatkan. Beberapa fasilitas seperti area parkir, papan informasi, dan sarana kebersihan telah tersedia, namun jumlah dan kondisinya masih perlu disesuaikan dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama berkunjung. Pemerintah daerah telah melakukan pembangunan dan perbaikan fasilitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan desa wisata.

4) Kunjungan wisatawan Berbasis Event

Jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Adat Sade cenderung meningkat ketika terdapat event besar di Kawasan Mandalika maupun pada musim liburan. Meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak positif terhadap penjualan tenun, souvenir, dan jasa pemandu wisata. Namun, di luar waktu tersebut jumlah kunjungan wisatawan relatif lebih rendah. Untuk menjaga kestabilan kunjungan wisatawan, pemerintah daerah terus melakukan promosi serta mendukung penyelenggaraan atraksi budaya yang dapat menarik wisatawan sepanjang tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, dinamisator, koordinator, inovator, dan regulator dalam pengembangan Desa Wisata Adat Sade. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan promosi, pembinaan masyarakat, koordinasi dengan berbagai pihak, pengembangan inovasi wisata, serta penyusunan regulasi. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan fasilitas, koordinasi yang belum maksimal, inovasi yang masih terbatas, serta pengawasan terhadap regulasi yang masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menerapkan strategi melalui peningkatan promosi wisata, pemberdayaan masyarakat, pengembangan atraksi wisata, dan penyediaan sarana pendukung. Strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penjualan produk lokal, dan kunjungan wisatawan. Namun, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat masih belum merata.

Pengembangan Desa Wisata Adat Sade masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kunjungan wisatawan yang masih

bergantung pada penyelenggaraan event. Kendala tersebut menyebabkan pengembangan desa wisata belum berjalan secara optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran guna optimalisasi pengembangan Desa Wisata Adat Sade di masa mendatang:

1. Hendaknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat terus meningkatkan pengembangan Desa Wisata Adat Sade melalui penyediaan dan perbaikan fasilitas penunjang wisata, peningkatan pelatihan dan pendampingan masyarakat khususnya dalam bidang digitalisasi dan pengelolaan usaha wisata, serta memperkuat promosi wisata secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong penyelenggaraan event budaya secara rutin dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Desa Adat Sade.
2. Hendaknya Pengelola dan Pokdarwis Desa Wisata Adat Sade diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan wisata, menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta terus melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi daya tarik utama desa wisata. Selain itu, pengelola perlu lebih aktif memanfaatkan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana promosi serta mengembangkan kegiatan wisata yang lebih beragam agar kunjungan wisatawan tidak hanya bergantung pada event tertentu.
3. Hendaknya peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan

penelitian ini dengan mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan pengembangan desa wisata, seperti peran masyarakat, sektor swasta, dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai dampak pengembangan desa wisata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, H. M., & Zubakhrum, M. B. (2024). *Administrasi pemerintahan daerah*. Jombang, Jawa Timur: Askara Sastra.
- Azzura, A. N. (2024). Pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata di Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Skripsi). Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. *E-Journal Unesa*, 1–16.
- Alfianto, R. (2021). Analisis peran pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan wilayah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 115–128.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Margono, Didi Sudiana, I. H., & Wiwit Yuhita. (2025). Strategi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. (*Studi Desa Wisata Neval van Java di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*). c, 41–50.
- Budiatiningsih, M., Ulya, B. N., Kurniansah, R., Hulfa, I., Rojabi, S. H., & Supita, S. D. (2025). Pengembangan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 19, 12–29.
- Brahmantari, N. P. E., Swarjana, I. K., & Suasapha, A. H. (2023). Strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat lokal. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 23(1), 38–48.
- Chakim, M. L. (2023). *Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwihartanto, D., Gunawan, W., & Abidin, Z. (2025). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip*, 1(2), 2025. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>
- Deki, J. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan Di Kabupaten Bengkayang. *GOVERNANCE, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan*, 1–17.

- Dinar, M., & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. CV Nur Lina.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) 2
- Effendi, A. (2019). *Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Desa Wisata Berbasis Komunitas*. Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.
- Hasanah, U., Fatimatuzzakhro, S., Febriani, S., & Nanda, W. (2025). *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa (Studi di Desa Sade , Kecamatan Pujut , Kabupaten Lombok Tengah)*. 2(1).
- Hermawan, H. (2016). *Dampak pengembangan desa wisata nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal*. III(2), 105–117.
- Iswanti, S., & Zulkarnain. (2022). *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat*. Pekanbaru: UR Press.
- Juhainah, Wahyu Firmansyah, N. A. (2023). Analisa Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Di Kampung Wisata Pantai Pasir Putih. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, xx, 1–10. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>
- Kurniawan, B. (2023). *Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal*. Alfabeta.
- Kurniansah, R. (2023). Pengembangan desa wisata menggunakan SOAR model. P2WD Journal, IPB.
- Koentjaraningrat. (2018). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Lobbu, D. N., Lengkong, F. D. J., & Pombengi, J. D. (2018). Peran pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Murapi, I., Oki Astarini, D. A., & Khairunnisa. (2023). Eksistensi dan Konsep Pengembangan Kampung Ekowisata Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat. *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 145–146.
- Mahanani, A. I., & Listyorini, H. (2021). Analisis potensi dan strategi pengembangan desa wisata berbasis komunitas. *Jurnal Ilmiah Kepariwisata*, 15(2), 154–166.
- Mamonto, D. N. (2021). *Strategi pengembangan daya tarik wisata* (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

- Mumtaz, F., & Karmila, N. (2021). Pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 3(1), 1–10.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nilawati. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 85–96.
- Muluk, M. R. K. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. ITS Press.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nuruni dan Kustini. (2011). Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemendan Kewirausahaan* Vol.7 (1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Pearson Education.
- Putri, C. A., Budiatiningsih, M., & Ulya, B. N. (2025). Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan desa wisata Aik Berik. *JRT Journal Of Responsible Tourism* Vol.4, No.3, Maret 2025.
- Pratiwi, D. S., Sari, N., & Dinanti, D. (2019). Elemen Pariwisata Berkelanjutan di Desa Sade Kabuoaten Lombok Tengah. *Planning for Urban Region and Environment Journal*, 8(April), 97–106.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Paradana, A., Muhammad, & Hamrun. (2021). Strategi dinas pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. *Kanal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 177–187.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025* (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK).
- Salasiah, & Albertus, F. (2025). *Buku Ajar Pengantar Sosiologi* (Cetakan pertama).

Zahir Publishing.

- Sulaeman. (2024). Kajian potensi unggulan Desa Wisata Sade sebagai obyek desa wisata budaya berbasis masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen (JAEM)*, 1(2), 16–23
- Syaifudin, & Ma'ruf. (2022). *Manajemen dan kebijakan pembangunan pariwisata daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 231–239.
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soemarno. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata*. Universitas Brawijaya.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metodologi penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI
- Virania, W. (2023). Pengembangan wisata adat Sade dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Rembitan Lombok Tengah (Skripsi). Universitas Islam Negeri Mataram.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (Edisi ke-2). Jakarta: Bumi Aksara.